INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI YOGYAKARTA-VICTORIA DALAM MENGUATKAN KEBUDAYAAN (2014-2024)

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

VIKRI AVIVA MUSTAQIM

22323181

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI

YOGYAKARTA-VICTORIA DALAM MENGUATKAN KEBUDAYAAN

(2014-2024)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

VIKRI AVIVA MUSTAQIM

22323181

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Institusionalisasi Kerja Sama Paradiplomasi Yogyakarta-Victoria dalam Menguatkan Kebudayaan (2014-2024)
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

6 Januari 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
2	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	
3	Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

18 Desember 2025



Vikri Aviva Mustaqim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Institusionalisasi Kerja Sama Paradiplomasi Yogyakarta-Victoria dalam Menguatkan Kebudayaan (2014-2024)"** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, semangat dan petunjuk kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini ditengah hiru pikuk nya dunia,
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.,
3. Prof. Dr.rer. soc. Masduki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya,
4. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional,
5. Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I. selaku dosen pembimbingan Tugas Akhir. Terimakasih atas waktu, arahan, semangat, dan energi selama bimbingan yang diberikan kepada penulis. Berkat dorongan beliau penulis dapat berada di titik ini

6. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) D.I. Yogyakarta, khususnya kepada Fathi Mustaqim, S.S., M.Comm., M.Journ, yang telah memberikan izin penelitian serta membantu dalam proses pengambilan data dan wawancara,
7. Derina Faslig Silitonga, S. Hub. Int., M. H. I. selaku dosen Metodologi Penulisan Tugas Akhir. Terimakasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama satu semester dalam penyusunan proposal Tugas Akhir,
8. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, penjelasan yang disampaikan, dan juga bimbingan yang selalu dilakukan bapak ibu dosen sehingga mempermudah perjalanan mahasiswa dalam menuntut ilmu,
9. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu Sumarti dan Bapak Sukirman, sebagai pendukung utama dalam hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak pernah putus, serta doa-doa di setiap sujud yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik yang selalu memberikan motivasi, kesabaran, dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai salah satu wujud bakti dan tanda terima kasih atas segala keringat yang Ibu dan Bapak curahkan demi masa depan penulis,
10. Kepada kedua saudara penulis, Septi Puspitaningrum S. Pd., Gr. dan Alm. Dwi Achmat Nur Cahyo Nugroho yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis,

11. Untuk Isyana Sarasvati. Terimakasih karena setiap melodi indah yang kau ciptakan selalu membangkitkan semangat penulis,
12. Kepada tetangga setia penulis, Ni Luh Komang Indirawati, S. Gz dan Cindy Ayulia Rahma. Terimakasih telah menemani penulis selama 22 tahun serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis,
13. Kepada teman dekat penulis, Citra Angelina Saroyo, Muhammad Rahman Ashidieq, dan Najwa Syifa Habibillah. Terimakasih atas suka dan duka selama 3 tahun terakhir,
14. Kepada kakak tingkat penulis, Lu'ay Maulidya Latifa, S. Hub. Int., Abimastra Rakyan Hariyanto, S. Hub. Int., dan Fatimah Amir. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan bantuan selama masa perkuliahan dan selalu sabar menghadapi penulis,
15. Kepada teman-teman Internal Affairs FPCI UII Batch 6, khusus untuk Putri Shania Azizah Dinnar, S.H., CLA. yang telah menjadi partner kerja terbaik penulis selama 2 tahun dan Ima, Abi, Syifa, Nida, Yunita, Ridlo, Fadhil, serta Internal Affairs Batch 5,
16. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 71 Unit 133, Salima, Adila, Nia, Nazry, Wafa dan Nalendra. Terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis,
17. Kepada teman-teman HI UII Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena menjadi teman baik penulis selama berkuliah di HI UII.

DAFTAR ISI

SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR SINGKATAN xi
ABSTRAK xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan Penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Argumen Sementara 14
1.8 Metode Penelitian 15
1.8.1 Jenis Penelitian *15*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian *16*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data *16*
1.8.4 Proses Penelitian *17*
1.9 Sistematika Pembahasan 18
BAB 2 FAKTOR PENENTU KERJA SAMA YOGYAKARTA-VICTORIA 19
2.1 Persamaan Karakteristik Yogyakarta-Victoria 20
2.1.1 Persamaan Status Administrasi *21*
2.1.2 Kedekatan dan Potensi Kerja Sama Sektor Kebudayaan Yogyakarta-Victoria *26*
2.2 Regulasi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) 29
2.2.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 *29*
2.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *31*
2.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 *32*
BAB 3 INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI YOGYAKARTA-VICTORIA 33
3.1 Implementasi Tinjauan Institusionalisasi Kerja Sama Paradiplomasi 34
3.1.1 Departemen Khusus untuk Urusan Kerja Sama Luar Negeri 34
3.1.2 Kunjungan Resmi Pemerintah Daerah ke Mitra 39
3.1.3 Partisipasi dalam Berbagai Agenda Internasional 43

3.2 Ketiadaan Tinjauan Intitusionalisasi Kerja Sama Paradiplomasi 50
3.2.1 Pembukaan Kantor Subnasional Permanen di Negara Asing 50
3.2.2 Pembentukan Jaringan Regional Multilateral 53
3.2.3 Bekerja dalam Delegasi Resmi Pemerintah Pusat 55
BAB 4 KESIMPULAN **59**
DAFTAR PUSTAKA **60**
LAMPIRAN **66**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Empat Pembagian Kewenangan antara Central State dan SSGs Menurut Jorge A. Schiavon 24
Tabel 2. Tabel Klasifikasi Kerja Sama Luar Negeri di Yogyakarta 36
Tabel 3. *Timeline* Kunjungan Resmi Pemerintah Daerah Yogyakarta ke Victoria, Melbourne 40
Tabel 4. *Timeline* Kegiatan Youth Music Camp 44

DAFTAR SINGKATAN

ACCA	:	Australia Centre for Contemporary Art
ACMI	:	Australia Center for the Moving Image
AIBC	:	Australia Indonesia Business Council
AIC	:	Australia-Indonesia Center
ALGA	:	Australian Local Government Association
AsiaTOPA	:	Asia Pacific Triennial of Performing Art
BPAD	:	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
CEF	:	Creative Economic Forum
COAG	:	Council of Australian Government
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FDI	:	Foreign Direct Investment
GLS	:	Gerakan Literasi Sekolah
ITPC	:	*I*ndonesia Trade Promotion Centre
JF	:	Japan Foundation
KSDPL	:	Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
LHC	:	The League of Historical Cities
LoI	:	Letter of Intent
MoU	:	Memorandum of Understanding
MSO	:	Melbourne Symphony Orchestra
NGO	:	Non-Governmental Organization
NGV	:	National Gallery of Victoria
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemda DIY	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PNWER	:	Pacific North-West Economic Region
SIP	:	Singapore International Foundation
SSIGs	:	sub-state government
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
WoW	:	Words on Wheel
YRO	:	Yogyakarta Royal Orchestra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tinjauan institusionalisasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Negara Bagian Victoria, Australia, dalam memperkuat sektor kebudayaan periode 2014-2024. Melalui konsep paradiplomasi, aktor sub-negara memiliki ruang untuk menjalin hubungan luar negeri guna memenuhi kepentingan domestik yang spesifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada strategi implementasi yang digunakan oleh Pemda DIY untuk melembagakan kerja sama *sister province* dengan Victoria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses institusionalisasi kerja sama Yogyakarta-Victoria diimplementasikan melalui beberapa cara utama menurut kerangka pemikiran Alexander S. Kuznetsov, yaitu memiliki departemen khusus, kunjungan resmi luar negeri, dan partisipasi dalam agenda internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun proses institusionalisasi berjalan efektif di sektor budaya, terdapat hambatan pada aspek pembukaan kantor perwakilan permanen dan partisipasi dalam delegasi resmi pusat karena adanya batasan regulasi nasional dan prinsip negara kesatuan Indonesia. Kerja sama ini berhasil menciptakan mekanisme transfer pengetahuan dan penguatan hubungan antar-masyarakat (*people-to-people connectivity*).

Kata-kata kunci: Paradiplomasi, Institusionalisasi, Yogyakarta, Victoria, Kebudayaan, *Sister Province*.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the institutionalization of paradiplomacy conducted by the Special Region of Yogyakarta (DIY) Regional Government with the State of Victoria, Australia, in strengthening the cultural sector during the 2014-2024 period. Through the concept of paradiplomacy, sub-state actors have the space to establish foreign relations to meet specific domestic interests. The method used in this study is qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The research focuses on the implementation strategies used by the DIY Regional Government to institutionalize sister province cooperation with Victoria. The results show that the institutionalization process of Yogyakarta-Victoria cooperation was implemented through several main methods according to Alexander S. Kuznetsov's framework, namely having a special department, official overseas visits, and participation in international agendas. This study concludes that although the institutionalization process is effective in the cultural sector, there are obstacles in the aspects of opening a permanent representative office and participating in official central delegations due to national regulatory restrictions and the principle of Indonesia as a unitary state. This cooperation has succeeded in creating a mechanism for knowledge transfer and strengthening people-to-people connectivity.

Keywords: *Paradiplomacy, Institutionalization, Yogyakarta, Victoria, Culture, Sister Province.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan modernisasi telah memperluas konfigurasi aktor dalam hubungan internasional, tidak lagi terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku utama. Transformasi signifikan dalam perubahan tersebut, baik di level nasional, regional, maupun global, mengharuskan adanya kebijakan serta alat baru dalam mengelola hubungan antarnegara (Iqbal dan Irawati 2023, 62). Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan negara-negara untuk dengan mudah mengakses informasi lintas batas serta memahami aktifitas-aktifitas masyarakat dunia. Sehingga menciptakan fenomena '*borderless*', di mana batas-batas negara semakin kabur dan seolah-olah telah membentuk *global village* bagi masyarakat internasional (Indriati 2010, 62).

Dengan adanya fenomena '*borderless*' masyarakat internasional dapat dengan mudah untuk saling terhubung satu sama lain tanpa ada batasan di dalam semua aspek kehidupan (Heriyono 2019, 299). Hal ini juga turut mempengaruhi sistematika dan proses dalam kerja sama untuk memenuhi kebutuhan antar negara. Di mana saat ini kerja sama tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan antar masyarakat internasional. Hal ini dapat diimplementasikan dalam bentuk program pertukaran pelajar, tenaga kerja, dan kegiatan budaya.

Dalam menjembatani program-program kerja sama tersebut, belakangan ini populer mekanisme paradiplomasi di mana pemerintah daerah dapat

menjalankan hubungan luar negeri dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka secara spesifik (Mukti 2013, 2). Hubungan luar negeri ini dapat disebut juga sebagai hubungan antar *sub-state*, yang di mana *sub-state* ini dapat menjalankan perjanjian internasional dengan pemerintah yang setara provinsi daerah antar negara (Yahya 2022, 1). Pada dasar pemikiran paradiplomasi lahir sebagai legitimasi bahwa sistem internasional tidak bersifat *state centric* melainkan menjadi perkembangan munculnya berbagai aktor *non-state*, seperti kelompok kepentingan, individu, organisasi dan *sub-state*, sehingga diverifikasi peran aktor diplomasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat terlibat secara langsung dalam hubungan luar negeri tanpa harus aktif dalam melaporkan kegiatan kepada pemerintah pusat (Fathun, n.d., 77; Faishal dan Yulianti 2024, 126; Stone dan Moloney 2019, 135).

Yogyakarta memiliki kemampuan untuk menjalin kerja sama luar negeri dalam berbagai bidang. Kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menerapkan konsep *sister province*. Konsep *sister province* disebut sebagai paradiplomasi karena dilakukan oleh pemerintah regional (pemerintah daerah) yang memiliki kapasitas untuk melakukan kerja sama luar negeri. Istilah ini bermakna sebagai '*the foreign policy of non-central government*' (Mukti 2013, 37). Kerja sama ini terbentuk karena adanya kesamaan karakteristik pada setiap kota/provinsi dengan kota/provinsi lainnya, dalam hal sejarah, budaya dan karakteristik (Renggani 2018, 2).

Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, memiliki otonomi daerah (desentralisasi) yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta menyandang status

sebagai Daerah Istimewa secara resmi sehingga dapat melaksanakan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat (Buton, Narjilan, dan Erik 2019, 1). Desentralisasi dinilai dapat menyalurkan sumber daya, seperti tanggungjawab dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Tavares 2016, 5). Selain itu, Yogyakarta dapat menjalin kerja sama luar negeri sesuai dengan kebutuhan domestik. Berdasarkan konsep paradiplomasi kemudian didukung dengan adanya otonomi daerah, langkah konkret yang dapat diambil dalam kerja sama ini adalah menerapkan konsep *sister province* ataupun *sister city.*

Kapabilitas unggul Yogyakarta di bidang kebudayaan dan pendidikan telah menarik perhatian sejumlah negara untuk menawarkan kerja sama internasional, khususnya dalam pengembangan sektor budaya. Seperti Negara Bagian Victoria, Australia merupakan kerja sama termuda yang telah dilakukan oleh Pemda D.I. Yogyakarta yang berfokus pada kebudayaan, pendidikan, dan industri kreatif. D.I. Yogyakarta dan Victoria memiliki persamaan dalam bidang seni budaya. Yogyakarta memiliki kebudayaan dan kesenian seperti wayang, seni tari, seni teater, serta seni musik. Musik di D.I. Yogyakarta berkembang sangat pesat mulai dari musik tradisional dan modern, musik tradisional seperti gamelan, sedangkan musik modern yaitu orkestra. Sementara itu, Victoria merupakan sebuah negara bagian yang unggul dalam bidang seni lukis, seni musik dan seni teater. Seni musik di Victoria mempunyai keunggulan tersendiri, seperti *Melbourne Symphony Orchestra* (MSO) yang menjadi *Top 20 Orchestra in the World* (Riano 2022, 5).

Berdasarkan persamaan tersebut, kebutuhan untuk menjalin kerja sama dalam memperkuat kebudayaan menjadi semakin penting.

Pemilihan kerja sama di bidang budaya, khususnya musik dan manajemen seni pertunjukan, dilakukan berdasarkan analisis mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan kerja sama yang berbeda antara Yogyakarta dengan mitra kebudayaan sebelumnya. Yogyakarta mengevaluasi pengalaman dan keunggulan setiap mitra agar kerja sama yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal sesuai tuntutan pengembangan budaya lokal. Dalam konteks kerja sama dengan Victoria, faktor utama yang mendorong keputusan tersebut adalah kehadiran MSO, orkestra tertua dan salah satu yang terbaik di dunia. Keunggulan ini menjadikan Victoria sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas profesional musik di Yogyakarta, baik dari sisi kualitas pertunjukan, manajemen pertunjukan, maupun pengembangan bakat musisi lokal. Kerja sama ini memungkinkan pengembangan kapasitas, teknik artistik, dan manajemen seni pertunjukan kelas dunia yang sebelumnya belum dimiliki Yogyakarta.

Sementara itu, kerja sama *sister province* dengan Kyoto berfokus pada pengelolaan konservasi cagar budaya (Alfarisi 2021, 21). Kolaborasi ini menghasilkan rekomendasi gambaran ideal dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan pelestarian situs-situs bersejarah di Yogyakarta seperti Tamansari dan Kotagede, yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda dibandingkan pengembangan musik. Dengan demikian, Yogyakarta secara strategis memilih mitra kerja sama yang sesuai bidang dan kekuatan masing-masing, Victoria untuk pengembangan musik dan seni pertunjukan berkualitas internasional, serta Kyoto untuk pelestarian budaya dan konservasi cagar budaya melalui pakarnya.

Pembeda fokus ini menunjukkan bahwa keputusan kerja sama didasarkan pada kebutuhan spesifik dan keunggulan mitra untuk mendukung pembangunan budaya Yogyakarta secara holistik dan terarah.

Program kolaborasi dan transfer pengetahuan melalui magang *Youth Music Camp*, yang dibimbing langsung oleh Melbourne Symphony Orchestra bagi musisi bertalenta dari Yogyakarta ke Victoria selama satu bulan, memberikan kesan mendalam bagi kedua belah pihak (Putri 2024, 64). Program ini menerima apresiasi tinggi dari Gubernur DIY maupun Pemerintah Negara Bagian Victoria. Berdasarkan keberhasilan tersebut, Pemda D.I. Yogyakarta dan Negara Bagian Victoria memiliki alasan kuat untuk memperkuat kerja sama teknis yang ada. Victoria dipilih sebagai mitra kerja sama karena selain memiliki kesamaan karakter budaya dengan D.I. Yogyakarta, Victoria juga memiliki tradisi musik kelas dunia yang kuat melalui MSO serta menunjukkan komitmen terhadap program *sister province*, kemudian ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 4 Mei 2017, sehingga menjadikan kerja sama ini lebih relevan dan strategis dibandingkan dengan mitra lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan institusionalisasi paradiplomasi Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan Negara Bagian Victoria dalam upaya menguatkan sektor kebudayaan pada tahun 2014-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tinjauan institusionalisasi paradiplomasi Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan Negara Bagian Victoria.
2. Untuk menganalisis peran paradiplomasi dalam kerja sama Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan Negara Bagian Victoria dalam memperkuat sektor kebudayaan.

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian ini adalah mengidentifikasi tinjauan institusionalisasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemda D.I. Yogyakarta dengan Negara Bagian Victoria dalam menguatkan sektor kebudayaan. Penelitian ini difokuskan pada periode 2014 hingga 2024 yang mencakup tahap awal penjajakan kerja sama, penandatanganan *Letter of Intent* (LoI), implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU), serta pelaksanaan program-program kebudayaan yang telah dilaksanakan dalam kerangka kerja sama tersebut.

Rentang waktu penelitian ini ditentukan berdasarkan kunjungan balasan Yogyakarta ke Victoria pada tahun 2014 hingga berakhirnya masa berlaku *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2020. MoU yang ditandatangani pada 2017 tersebut memiliki masa berlaku tiga tahun dengan klausul yang memungkinkan adanya penegasan kembali (*reaffirmation*). Sebagai bentuk keberlanjutan konkret pasca-berakhirnya MoU tersebut, komitmen kerja sama diteruskan melalui penandatanganan *Implementation Agreement* untuk periode 2022–2024. Dalam kesepakatan teknis ini, Pemerintah Daerah DIY diwakili secara langsung oleh Dinas Kebudayaan DIY guna memastikan

kontinuitas program kerja sama kebudayaan. Penelitian ini secara khusus membatasi analisis pada sektor kebudayaan dan tidak membahas sektor lain seperti pendidikan maupun industri kreatif. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan gambaran mendalam tentang proses dan hasil institusionalisasi kerja sama budaya antara D.I. Yogyakarta dan Victoria selama periode tersebut, serta kontribusinya terhadap penguatan hubungan kedua daerah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebagai bagian dari kebutuhan penelitian, melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sangat penting untuk menghindari plagiarisme serta menunjukkan kebaruan penelitian. Penulis telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal telah dipublikasikan sebelumnya. Penelitian pertama berasal dari jurnal yang disusun oleh Muhammad Reza Rizaldi, Vivit Widi Haryati, Caesar Adrea Adi Wibowo, dan Paquita Putrina Febriandi berjudul "Analisis Kerja Sama Budaya dalam Program *Sister City* Yogyakarta-Kyoto Tahun 2016-2021" (Rizaldi et al. 2024, 1). Penelitian ini mengambil studi kasus *sister city* Yogyakarta dan Kyoto yang telah terjalin sejak 1985 di bidang kebudayaan. Dimana letak perbedaan dengan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus yang digunakan dalam penelitian. Rezaldi, dkk menggunakan pengertian paradiplomasi dari Cornago yang dimana aktivitas tersebut merupakan aktivitas hubungan internasional yang dijalankan oleh aktor *sub-state* untuk mempromosikan kepentingan budaya, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Dalam melakukan kerja sama ini, kedua pihak berfokus pada penguatan kebudayaan, seperti *fashion show* mengenakan kimono bercorak batik

yang bertujuan untuk mempersembahkan sebuah kolaborasi. Program lain seperti lomba lukis DIY-Kyoto yang menjadi acara tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY. Program-program ini memperkuat pertukaran budaya dan pemahaman antar daerah. Rezaldi, dkk menyoroti keberhasilan kerja sama dalam mempromosikan kebudayaan. Namun, penelitian ini juga memberikan evaluasi khusus pada kerangka kerja dalam bidang kebudayaan.

Aktor utama dalam kerja sama ini adalah Yogyakarta dibawah Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kyoto di bawah Daisaku Kadokawa serta Duta Besar Jepang. Dalam merealisasi program sering dilakukan di dalam negeri, contohnya ketika Wakil Gubernur Kyoto melakukan kunjungan ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka memperingati kerja sama dan program beasiswa ke Kyoto University, sehingga UGM sebagai instansi pendidikan menjadi aktor yang dominan dalam kerja sama bidang pendidikan. Kemudian terdapat organisasi yang bergerak dibidang kebudayaan yang memiliki peran dalam melakukan pertukaran budaya, seperti *The League of Historical Cities* (LHC) dan *Japan Foundation* (JF). Akan tetapi, pengaruh kedua organisasi tersebut tidak berjalan efektif karena adanya pengaruh dari Keraton Yogyakarta yang kuat dalam masyarakat, sehingga membutuhkan waktu lama untuk dapat menerima organisasi tersebut. Dalam konteks aktor, yang mencakup kapasitas, otoritas, legitimasi dan pengakuan, DIY dan Kyoto menunjukkan masih kurangnya kapasitas mereka dalam berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kegiatan paradiplomasi.

Penelitian kedua berasal dari jurnal yang disusun oleh Stefhani Krisna Mei Simanjuntak, Surya Sakti Hadiwijoyo, dan Triesanto Romulo Simanjuntak

berjudul "Implementasi Kerjasama *Sister Province* Antar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Victoria Melalui *Melbourne Symphony Orchestra* (MSO)" (Simanjuntak, Hadiwijoyo, dan Simanjuntak 2017, 1) menjelaskan tentang implementasi kolaborasi program melalui *Melbourne Symphony Orchestra* untuk meningkatkan akses pendidikan seni dan pengembangan infrastruktur seni di DIY. Sejak 16 November 2015, Yogyakarta dan *Australia-Indonesia Center* (AIC) telah menandatangani kerja sama terkait penyelenggaraan acara budaya di Yogyakarta. Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan *Youth Music Camp* dan pertunjukkan MSO di Prambanan tahun 2017. Banyak program yang telah terlaksana setiap tahunnya, termasuk pertukaran budaya, workshop, dan konser kolaboratif yang melibatkan musisi muda di Yogyakarta.

Manfaat yang paling signifikan yang didapatkan oleh Yogyakarta dalam kerja sama ini adalah lahirnya *Yogyakarta Royal Orchestra* (YRO) pada tahun 2021. Kemudian, pada 11 Juli 2024 telah diadakan konser kolaboratif antara MSO, YRO dan partisipan *Youth Music Camp* di Candi Prambanan. Hal ini merupakan salah satu pencapaian yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara Yogyakarta dan Victoria sehingga perjanjian kedua pihak diperpanjang untuk periode 2025-2028. Secara keseluruhan, implementasi kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antar daerah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan musik klasik di Yogyakarta.

Penelitian ketiga berasal dari jurnal yang disusun oleh Eva Yusnita Chandra dan Dyah Estu Kurniawati berjudul "*The Practice of Paradiplomacy in Cooperation between the Yogyakarta Special Region Government and the Singapore International Foundation in the Education Sector*" (Chandra dan

Kurniawati 2022, 1) penelitian ini menjelaskan bagaimana kolaborasi antara Pemda D.I. Yogyakarta dengan aktor *Non-Governmental Organization* (NGO) yaitu *Singapore International Foundation* (SIP) dalam sektor pendidikan. Fokus utama dari SIP ini adalah membangun pemahaman antar budaya antara kedua belah pihak. Kerja sama ini didasarkan pada program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pelaksanaan kerja sama dengan SIP akan memberikan dampak positif bagi Yogyakarta dalam mengembangkan kemampuannya dan mampu mengenali interaksi dengan budaya lain. Dimana letak persamaan penelitian dengan penulis adalah menganalisis praktik kerja sama yang terjadi dengan Pemda D.I. Yogyakarta.

Program yang diterapkan dalam sektor pendidikan yaitu *Words on Wheel* (WoW), program sukarela dari SIP dalam bentuk pengoperasian perpustakaan keliling dengan menggunakan mobil, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca di masyarakat. Program ini diresmikan pada 13 November 2017 dan melibatkan tiga pihak, yaitu Pemda D.I. Yogyakarta melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) dengan SIP dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura. Dalam pelaksanaan program, mobil perpustakaan keliling akan beroperasi empat kali seminggu dan mengunjungi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah dari 10 sekolah di Yogyakarta. Selain itu, relawan SIP juga memberikan pelatihan bagi staf BPAD DIY dan pustakawan setempat dengan memperkenalkan berbagai aplikasi interaktif. Selama akhir program pada 2020, Indeks Alibaca dari DIY meningkat, dilihat dari Dimensi Keterampilan, Yogyakarta menempati posisi ke-7 dengan skor 79,18. Kemudian

Dimensi Akses menempati posisi ke-1 dengan skor 47,11 mengalahkan DKI Jakarta yang menduduki peringkat kedua. Hal ini menunjukkan keberhasilan kerja sama DIY dengan SIP yang mampu mengembangkan budaya membaca di masyarakat melalui program WoW.

Dari ketiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kerja sama paradiplomasi dan implementasi program kerja di Yogyakarta. Belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai tinjauan institusionalisasi yang dilakukan oleh Pemda D.I. Yogyakarta dalam membangun hubungan dengan Negara Bagian Victoria. Oleh karena itu, penulis dalam tulisan ini akan berfokus membahas mengenai tinjauan institusionalisasi Pemda D.I. Yogyakarta dalam membangun hubungan kerja sama dengan Negara Bagian Victoria.

1.6 Kerangka Pemikiran

Istilah paradiplomasi muncul dalam literatur ilmiah pada tahun 1980an. Duchacek menjelaskan penambahan kata “para” sebelum “diplomasi” cukup mengekspresikan apa yang terlibat, yaitu kebijakan internasional sebuah negara yang dapat paralel, terkoordinasi, atau saling melengkapi dengan pemerintah pusat, tetapi juga dapat bertentangan dengan kebijakan dan politik internasional negara tersebut (Paquin 2020, 49). Paradiplomasi pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan kegiatan internasional yang dilakukan oleh kota maupun provinsi dalam konteks globalisasi dan peningkatan hubungan lintas batas untuk memenuhi kepentingan domestik kota tersebut (Paquin 2020, 49; Kuestra, Quaresma, dan Conti 2025, 2). Paradiplomasi merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat menjalankan hubungan luar negeri dengan negara lain yang bertujuan untuk

memenuhi kepentingan mereka secara spesifik (Mukti 2013, 2). Secara praktis, paradiplomasi menganggap bahwa aktor *sub-state* dapat secara mandiri mengurus kebutuhan domestiknya, karena memiliki pemahaman lebih baik tentang apa yang dibutuhkan di wilayah masing-masing.

Secara karakteristik, paradiplomasi dapat bersifat formal maupun informal, permanen maupun sementara, pemerintah maupun swasta, dan memiliki tujuan untuk memperkenalkan pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial ekonomi, budaya, maupun politik (Chandra dan Kurniawati 2022, 38). Seiring berkembangnya aktivitas paradiplomasi, muncul dorongan yang mendukung kerja sama dapat dibentuk. Seperti dorongan dalam pelestarian budaya, termasuk upaya untuk memperoleh dukungan internasional dalam menjaga bahasa dan warisan budaya. Karena kepentingan budaya suatu daerah seringkali melampaui batas negara, seperti yang dinyatakan Keating, strategi yang matang menjadi sangat penting dalam aktivitas paradiplomasi untuk menjalin hubungan eksternal (Rizaldi et al. 2024, 125).

Dalam memahami konsep paradiplomasi, penulis menggunakan pendapat dari Alexander S. Kuznetsov dalam buku "Theory and Practice of Paradiplomacy". Kuznetsov mendefinisikan paradiplomasi sebagai "*a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consist in self-sustained actions of regional government with foreign governmental and non-governmental actors*." (Kuznetsov 2015, 30-31). Maksud dari Kuznetsov adalah paradiplomasi adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dengan berbagai aktor pemerintah maupun non-pemerintah asing untuk mencapai

keuntungan ekonomi, budaya, politik, atau manfaat lainnya, sehingga kegiatan paradiplomasi hanya melibatkan tindakan yang berdiri sendiri oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional untuk memenuhi kepentingan khusus wilayahnya.

Dalam buku tersebut, Kuznetsov menjelaskan terkait apa saja cara utama untuk melembagakan kegiatan paradiplomasi:

1. Pembentukan kementerian atau departemen khusus regional yang bertanggung jawab atas urusan internasional. Departemen khusus ini bertujuan sebagai menjembatani proses kerja sama yang akan dilakukan dari kebijakan apa yang akan disepakati, program yang direncanakan, dan menjadi aktor penting dalam membangun hubungan diplomasi (Kuznetsov 2015, 111-113),
2. Pembukaan kantor subnasional permanen di negara asing. Pembukaan kantor ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik serta memberikan dukungan dan konsultasi bagi masyarakat regional dalam mengembangkan kontak internasional (Kuznetsov 2015, 111-113),
3. Kunjungan resmi pemerintah daerah ke wilayah mitra. Hal ini diperlukan untuk meninjau terkait keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya dari mitra dan untuk menggali lebih dalam potensi kerja sama apa yang akan dikembangkan kedepannya (Kuznetsov 2015, 111-113),
4. Partisipasi dalam berbagai agenda acara internasional. Partisipasi ini dapat dilakukan seperti pameran atau forum yang diselenggarakan oleh mitra serta dapat mengenalkan adanya kerja sama paradiplomasi kepada masyarakat (Kuznetsov 2015, 111-113),

5. Dibentuknya jaringan multilateral dan lintas batas sehingga daerah dapat memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan diplomatik lebih luas (Kuznetsov 2015, 111-113), dan
6. Partisipasi pemerintah daerah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh mitra dalam delegasi resmi pemerintah pusat. Mitra akan mengundang pemerintah Indonesia ketika negaranya mengadakan kegiatan terkait pengembangan sektor terkait dalam kerja sama. Dengan keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh mitra, hubungan antara kedua wilayah akan semakin erat dan pelaksanaan program-program yang telah disetujui dapat berjalan dengan lancar (Kuznetsov 2015, 111-113).

Dalam konteks kerja sama antara D.I. Yogyakarta dan Victoria, konsep paradiplomasi telah melegitimasi bahwa hubungan internasional tidak bersifat *state centric*, melainkan telah melibatkan berbagai aktor, seperti kelompok kepentingan, individu, organisasi dan *sub-state*. Dengan demikian, kerja sama antara Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan Negara Bagian Victoria dapat dipandang sebagai contoh dari bagaimana paradiplomasi dapat menjadi salah satu fenomena penting dalam dinamika hubungan internasional selain pihak negara.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep paradiplomasi yang telah diuraikan di atas, peneliti berargumen sementara bahwa Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta melakukan kerja sama dengan Negara Bagian Victoria dengan menerapkan tiga cara utama institusionalisasi, yaitu:

1. Terdapat departemen khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri di D.I. Yogyakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
2. Kunjungan resmi pemerintah daerah ke wilayah mitra, hal ini diimplementasikan ketika Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta melakukan kunjungan balasan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama,
3. Partisipasi dalam berbagai acara internasional, hal ini dapat diimplementasikan dengan diadakannya konser kolaborasi antara *Youth Music Camp* dengan *Melbourne Symphony Orchestra*,

Sementara itu, untuk dibentuknya jaringan multilateral dan bekerja dalam delegasi resmi pemerintah pusat dalam agenda internasional tidak terlaksana. Selain itu, pembukaan kantor permanen di luar negeri dilarang oleh pemerintah pusat Indonesia. Hal tersebut didasarkan atas sistem negara kesatuan Indonesia tidak mengizinkan pembukaan kantor perwakilan di luar negeri untuk menghindari adanya ancaman secara politik maupun keamanan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data dan strategi analisis data yang bergantung pada pengumpulan artefak sosial, seperti bentuk komunikasi teks, verbal dan visual, serta interpretasi fenomena sosial, tindakan, atau peristiwa (Lamont 2021, 94). Melalui beberapa deskripsi yang kemudian akan diolah

dengan tujuan untuk menemukan penjelasan yang akan mengarahkan pada kesimpulan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah *sub-state* sebagai aktor utama yaitu Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, Indonesia dengan mitra kerja sama Negara Bagian Victoria, Australia. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada analisis tinjaun institusionalisasi paradiplomasi yang dilakukan oleh D.I. Yogyakarta sehingga subjek penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta. Pemilihan subjek ini didasarkan pada karakteristik D.I. Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam bidang kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, serta aktif menjalin kerja sama luar negeri dalam bidang kebudayaan melalui konsep *sister province*.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik utama dalam sebuah penelitian. Sehingga fokus penelitian ini terletak pada strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dalam membangun hubungan dengan Negara Bagian Victoria. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini mencakup dokumen kerja sama, program budaya, serta wawancara dengan pihak terkait di Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah metode

wawancara dan dokumentasi. Alasan memilih metode ini adalah untuk memperoleh hasil sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam, tetapi tetap terarah pada topik-topik yang relevan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung dari pejabat Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta, pihak yang terlibat dalam paradiplomasi, dan aktor terkait lainnya.

Dokumentasi akan berfokus pada data sekunder, yakni dokumen yang mencatat kerja sama yang sudah berlangsung antara Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan Negara Bagian Victoria. Sedangkan, data dokumen dapat berupa data penelitian didapatkan melalui literatur-literatur berupa buku-buku, buletin daring, serta sumber artikel dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono 2013, 145).

1.8.4 Proses Penelitian

Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan suatu penjelasan informasi dalam bentuk narasi dan deskripsi yang lengkap, yang disusun berdasarkan dari reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa yang jelas, logis dan mudah dipahami. Sehingga seluruh data yang sudah di dapatkan di lapangan baik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dapat memunculkan deskripsi tentang peran paradiplomasi Yogyakarta dalam menguatkan budaya melalui kerja sama dengan Victoria (Miles dan Huberman 1994, 12).

Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya adalah kajian ulang atau pendalaman data maupun materi yang telah diperoleh, dengan cara membaca substansi dari masing-masing sumber agar mendapatkan substansi atau gagasan yang tepat. Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dari materi kajian yang telah dikumpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab satu membahas mengenai perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi pola kerja sama antar negara, khususnya kerja sama paradiplomasi D.I. Yogyakarta dalam menguatkan sektor kebudayaan, provinsi yang memiliki potensi besar dalam pelestarian kebudayaan. Bab dua menganalisis faktor-faktor utama di balik kerja sama *sister province* Yogyakarta-Victoria mulai dari karakteristik mitra dan potensi budaya sebagai fondasi penguatan kebudayaan, hingga kerangka regulasi paradiplomasi di Indonesia yang akan menjadi hambatan dalam proses institusionalisasi. Bab tiga membahas bagaimana proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi D.I. Yogyakarta dengan Negara Bagian Victoria dalam menguatkan sektor kebudayaan. Pembahasan di bab tiga akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian di bab empat akan membahas kesimpulan dari penelitian ini.

BAB 2

FAKTOR PENENTU KERJA SAMA YOGYAKARTA-VICTORIA

Paradiplomasi atau diplomasi subnasional merupakan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah dengan mitra luar negeri guna memperkuat hubungan ekonomi, budaya, dan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Schiavon menyatakan bahwa paradiplomasi berfungsi sebagai alat untuk melakukan promosi (Schiavon 2019, 8). Aktivitas paling fundamental yang dilakukan adalah promosi ekonomi eksternal, yang mencakup upaya untuk mengamankan pasar bagi produk mereka, menarik investasi asing langsung (FDI) dan wisatawan, memfasilitasi transfer teknologi, serta menjalin kerja sama internasional dan menerima bantuan pembangunan. Di sisi lain, tujuan mereka juga mencakup promosi pertukaran sosial-budaya untuk menampilkan budaya, nilai, atau bahasa yang berbeda dari unit negara bagian tersebut.

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis faktor-faktor utama yang melatarbelakangi terbentuknya kerja sama *sister province* antara Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan Negara Bagian Victoria. Pembahasan akan diawali dengan tinjauan terhadap karakteristik kedua mitra serta kedekatan potensi budaya yang menjadi fondasi penguatan kebudayaan antarwilayah. Selanjutnya, penulis akan menguraikan kerangka regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan paradiplomasi tersebut. Sebagai pelengkap, bagian ini juga akan mengidentifikasi hambatan dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi.

2.1 Persamaan Karakteristik Yogyakarta-Victoria

Desentralisasi dianggap sebagai mekanisme penting yang memungkinkan penyaluran sumber daya secara lebih efektif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama dalam hal tanggung jawab dan wewenang (Riwayati 2024, 1). Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih besar untuk mengelola dan mengatur urusan yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat serta mempercepat pelayanan publik (Badan Pengkajian MPR RI 2018, 1). Selain itu, desentralisasi memfasilitasi distribusi sumber daya yang lebih merata, sehingga dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah (Tavares 2016, 5).

Apabila dikaitkan dengan aktivitas paradiplomasi merupakan sebagai produk langsung dari adanya desentralisasi yang dapat memberdayakan pemerintah daerah untuk terlibat dalam aktivitas internasional secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Dengan desentralisasi. pemerintah daerah dapat leluasa menjalin kerja sama internasional, seperti program *sister province*, transfer teknologi, pembangunan ekonomi dan pertukaran sosial-budaya untuk meraih tujuan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 menyatakan pada pasal 5 ayat (3) bahwa salah satu syarat dalam memenuhi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

(KSDPL) adalah persamaan status administrasi atau kesetaraan wilayah. Dalam kerja sama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Victoria, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan, keduanya tetap memiliki kesamaan sebagai wilayah yang menjadi bagian dari sebuah negara yang utuh (Putri 2024, 45). Apabila mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 363 ayat (1) menyatakan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemda diperbolehkan menjalin kerja sama luar negeri atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Hal tersebut dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan KSDPL dengan mengedepankan potensi daerah yang dimiliki oleh kedua belah pihak, khususnya dalam menguatkan kebudayaan. Sejalan dengan pasal 367 ayat (1), bahwa kerja sama ini bertujuan untuk terjalinnya pertukaran budaya, *transfer knowledge* melalui program *Youth Music Camp*, dan meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan.

2.1.1 Persamaan Status Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sering disingkat DIY, adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang masih mempertahankan sistem kerajaan tradisional di Pulau Jawa. Kepemimpinan DIY dijalankan oleh seorang Gubernur yang gelarnya adalah Sultan, yang tidak hanya berperan sebagai kepala daerah administrasi, tetapi juga sebagai simbol budaya dan sejarah kerajaan yang ada di wilayah tersebut. Keistimewaan ini membuat DIY berbeda dari provinsi lainnya karena

mengintegrasikan sistem pemerintahan modern dengan warisan kerajaan yang masih aktif dan dihormati.

Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, memiliki otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan Istimewa tersebut diantaranya : a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, b) kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, c) kebudayaan, d) pertanahan, dan e) tata ruang (Dwiyansany dan Listiya Wardhani 2019, 228). Maka dari itu, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta menyandang status sebagai Daerah Istimewa secara resmi sehingga dapat melaksanakan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 363 ayat (1) (Buton, Narjilan, dan Erik 2019, 1).

Secara historis, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pasca Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada 17 Maret 1813 oleh Pangeran Notokusumo (putera Hamengku Buwono I) yang bergelar Adipati Paku Alam I (Kraton Jogja, 2025). Pada masa penjajahan Belanda, hanya Karaton Ngayogyakarta yang diakui kedaulatannya hingga berakhirnya masa penjajahan di Indonesia yang ditandai dengan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Setelah peristiwa tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VII secara resmi menyatakan bahwa

wilayah kekuasaan mereka akan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan langsung berada di bawah tanggung jawab Presiden RI.

Pasca kemerdekaan Indonesia dalam rancangan peraturan yang berjudul "Peraturan tentang Pemerintahan Sementara dari Indonesia," yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo, dan Maramis, istilah "daerah-daerah yang istimewa memegang kekuasaan sendiri di Indonesia" digunakan untuk pertama kalinya. Istilah ini merujuk pada konsep daerah-daerah yang memiliki otonomi atau kewenangan mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *zelfbesturende landschappen* (Thaib 2005, 238). Dengan kata lain, daerah-daerah tersebut memiliki hak khusus untuk mengelola pemerintahan mereka tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat, menggambarkan sebuah bentuk desentralisasi yang diakui dalam struktur pemerintahan sementara Indonesia pada masa itu.

Pembagian kekuasaan yang terjadi di Australia berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Australia menganut sistem federasi, yang dimana pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan *sub-state government* (SSGs). Dalam buku Jorge A. Schiavon yang berjudul “Comparative Paradiplomacy” membagi menjadi empat kewenangan antara central state dan SSGs dalam beberapa jenis kewenangan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Negara Australia merupakan salah satu contoh negara yang memiliki kewenangan dalam hal urusan luar negeri yang inklusif.

SSGs memiliki kewenangan yang diatur secara konstitusional. Di Australia, negara-negara bagian diberikan kewenangan yang luas oleh konstitusi

untuk mengelola hubungan internasional secara mandiri. Konstitusi Australia menetapkan adanya "*residual powers*" (kewenangan sisa) bagi negara bagian, yang berarti mereka memiliki otoritas atas urusan yang tidak secara eksplisit diberikan kepada pemerintah federal (Schiavon 2019, 58). Dengan demikian, mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk aktif mendukung kepentingan luar negeri, khususnya dalam aspek ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata

Tabel 1. Empat Pembagian Kewenangan antara Central State dan SSGs Menurut Jorge A. Schiavon

		SSGs Partisipasi dalam Politik Luar Negeri, *Decision Making*, dan Implementasi	
		Eksklusif	Inklusif
Kewenangan Konstitusi untuk Melaksanakan Hubungan Luar Negeri	Ekslusif	Eksklusif: kendali pusat atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan tidak ada wewenang konstitusional untuk hubungan internasional SSGs.	Konsultatif: partisipasi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, tanpa wewenang konstitusional untuk hubungan internasional SSGs.
	Inklusif	Komplementer: pengendalian pusat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, dengan wewenang konstitusional untuk hubungan internasional SSGs.	Inklusif: partisipasi dalam pembentukan kebijakan luar negeri dan implementasinya, dengan wewenang konstitusional untuk hubungan internasional SSGs.

Sumber: Jorge A. Schiavon dalam buku "Comparative Paradiplomacy"

Seperti yang dilakukan oleh New South Wales yang menunjuk agen di London pada tahun 1864 untuk mengadvokasi kepentingan komersialnya, ini merupakan contoh nyata dari paradiplomasi (Schiavon 2019, 58). Hal ini memperlihatkan bahwa SSGs di Australia secara mandiri mengelola hubungan internasional mereka, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal yang sama juga dimiliki oleh Victoria melalui Department of the Premier and Cabinet, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan internasional. Departemen ini mengupayakan promosi kepentingan Victoria baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui *Council of Australian Government* (COAG) berperan sebagai forum antar-pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinasikan paradiplomasi yang dilakukan oleh SSG. Anggota COAG terdiri dari perdana menteri federal, para pemimpin negara bagian (premier) dan teritori (chief minister), serta Presiden *Australian Local Government Association* (ALGA). Menurut Painter dalam Shiavon (2019, 56), COAG didirikan karena pemerintah federal (commonwealth) merasa perlu adanya tindakan terkoordinasi dengan negara bagian untuk mencapai tujuan reformasi ekonomi. Tujuan COAG, termasuk untuk berkonsultasi mengenai isu-isu internasional. Awalnya koordinasi ini fokus pada urusan dalam negeri, namun kemudian membuka pintu bagi pemerintah federal dan SSGs untuk memasukkan aktivitas internasional sebagai bagian dari kerja sama mereka. Dengan demikian, SSGs dapat melaksanakan tindakan internasional di bidang yang menjadi wewenang konstitusional domestiknya.

Dalam sistem ketatanegaraan, Provinsi di Indonesia dan Negara Bagian di Australia memiliki status fundamental yang sama, yakni sebagai wilayah

administrasi tingkat pertama di bawah pemerintah pusat. Atas dasar kesamaan struktur administrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Negara Bagian Victoria memiliki kedudukan yang sejajar secara hukum dan politik. Sejalan dengan hal tersebut, dalam struktur pemerintahan negara bagian Victoria, jabatan Premier memegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang setara dengan jabatan Gubernur dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kerangka kerja sama *Sister Province*, Premier Negara Bagian Victoria berkedudukan sebagai mitra sejajar bagi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam aspek pengambilan keputusan kebijakan bilateral.

2.1.2 Kedekatan dan Potensi Kerja Sama Sektor Kebudayaan Yogyakarta-Victoria

Arah pengembangan potensi Pemda DIY sangat terikat pada kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemda DIY, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Pada dasarnya, misi pada RPJPD 2005-2025 bertujuan memantapkan posisi DIY sebagai:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal,
2. Mewujudkan budaya *adiluhung* (luhur) yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan,
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, dan
4. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda DIY 2009).

Keempat pilar visi tersebut memiliki satu landasan bersama, yaitu kebudayaan. Sesuai arahan Gubernur DIY yang menginginkan pemanfaatan budaya diintegrasikan ke dalam setiap sektor pembangunan agar lestari, Pemda DIY menjalankan berbagai upaya. Salah satu strategi yang disorot dalam kajian ini untuk mencapai visi tersebut adalah melalui jalinan kerja sama persahabatan dengan mitra-mitra internasional. DIY telah membangun hubungan kerja sama dengan Victoria sejak 2017 di berbagai bidang, salah satunya di bidang kebudayaan.

Negara Bagian Victoria, sebagai salah satu negara bagian di Australia yang memiliki keberagaman budaya dan kekayaan karya seni, bahkan Melbourne mendapatkan julukan sebagai "ibu kota seni", sebab di Victoria, terutama di Melbourne telah lama dikenal sebagai pusat seni kontemporer di Australia dan kawasan Asia-Pasifik (Jannah dan Azmi 2025, 486). Keberadaan museum-museum terkenal di Melbourne seperti, *National Gallery of Victoria* (NGV), *Melbourne Museum*, *Australian Center for the Moving Image* (ACMI), dan *Australian Centre for Contemporary Art* (ACCA) sebagai ruang untuk apresiasi dan media diplomasi budaya. Di bidang musik, terdapat *Melbourne Symphony Orchestra* yang masuk deretan orkestra terbaik dan tertua di dunia.

MSO memiliki rekam jejak tur internasional yang membanggakan, ditandai oleh statusnya sebagai orkestra Australia pertama yang tampil di luar negeri pada tahun 1965 dan yang pertama debut di Carnegie Hall pada tahun 1970 (Melbourne Symphony Orchestra, 2025). MSO telah membangun hubungan yang

kuat di Asia melalui kolaborasi rutin di Tiongkok, Indonesia, dan Singapura. Selain itu, orkestra ini juga tengah memperluas jangkauannya di Inggris dengan menjalin kemitraan baru bersama London Symphony Orchestra dan The Royal Academy of Music.

Yogyakarta diakui sebagai salah satu pusat utama kebudayaan Jawa di Indonesia. Jantung kekayaan budayanya terletak pada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi merupakan monarki konstitusional yang masih aktif dan berfungsi sebagai penjaga serta pelestari tradisi. Keraton secara aktif melestarikan berbagai bentuk seni klasik, mulai dari gamelan, tarian sakral seperti Bedhaya dan Srimpi, seni wayang kulit, hingga pakem batik tulis yang rumit (Dinas Kebudayaan DIY, 2012). Dari segi kebudayaan, Yogyakarta merupakan lokasi di mana terdapat banyak sekali ragam budaya yang masuk, dan dalam kurun waktu yang panjang tercipta sebuah akulturasi yang harmonis (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO 2019). Meski kaya akan aneka ragam budaya, Yogyakarta masih dapat mempertahankan identitas aslinya hingga saat ini dengan berpegang teguh pada adat dan tradisi Jawa. Kekayaan budaya kota ini tidak hanya terbatas pada warisan keraton. Yogyakarta juga menjadi rumah bagi peninggalan peradaban kuno yang diakui dunia, seperti Candi Prambanan yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 1991 (UNESCO di Indonesia, 2025).

Yogyakarta memilih Victoria sebagai mitra kerja sama kebudayaan dengan pertimbangan strategis yang sesuai dengan tujuan dalam RPJPD 2005-2025. Yogyakarta secara sengaja mencari mitra yang memiliki keunggulan dan kekuatan setara dalam bidang kebudayaan untuk menjalin kolaborasi. Identitas Yogyakarta

sebagai "kota budaya," yang serupa dengan julukan Melbourne, menjadi dasar utama. Kekuatan tersebut terlihat dari warisan budaya Keraton Ngayogyakarta, seperti tari Serimpi dan Bedoyo, dengan ekosistem seni modern yang berkembang melalui ArtJog dan Museum Sonobudoyo. Karena kekuatan yang saling melengkapi ini, kedua pihak dapat bekerja sama secara efektif untuk mengembangkan sumber daya manusia serta memperkuat industri kreatif di masing-masing daerah.

2.2 Regulasi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)

Hal mendasar yang menjadi fokus utama dalam tinjauan yuridis ini adalah mengenai asal-usul dan dasar hukum sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai entitas otonom. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak secara resmi dan sah sebagai pelaku dalam menjalankan hubungan serta kerja sama dengan pihak luar negeri. Kajian ini menitikberatkan pada aspek legal dan regulasi yang mengatur posisi pemerintah daerah dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, sehingga pemerintah daerah dapat secara mandiri atau bersama dengan pihak terkait melaksanakan kegiatan kerja sama luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menjadi payung utama aktivitas paradiplomasi. Mengacu pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan

daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

Klausul pada "konsultasi" dan "koordinasi" menegaskan bahwa perjanjian internasional dapat dibuat atas dasar persetujuan dari Menteri Luar Negeri yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kegiatan luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut bertujuan sebagai pemberian arah, membantu, dan memfasilitasi daerah dalam melaksanakan aktivitas internasional, mewujudkan kebijakan *one door policy* dalam hubungan dan kerja sama luar negeri Indonesia, dan mencegah timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah dan mitra (Susanty 2017, 14).

Kemudian, pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa. Berdasarkan pasal tersebut, legitimasi seorang kepala daerah dalam mengikatkan diri pada perjanjian internasional bergantung pada kepemilikan Surat Kuasa (*Full Powers*). Dalam kerangka otonomi daerah, Surat Kuasa berfungsi sebagai mandat resmi yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah pusat. Dokumen ini melegitimasi pelimpahan sebagian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama internasional. Kemudian, Surat Kuasa tersebut dijadikan dasar untuk menandatangani MoU oleh pemerintah daerah dengan mitra (Susanty 2017, 20).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 363 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, maka pemerintah daerah diperbolehkan melakukan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan dengan pasal 367 ayat (1) kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dapat meliputi:

a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
b. pertukaran budaya,
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan,
d. promosi potensi daerah, dan
e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini memberikan kewenangan dan pengakuan resmi kepada gubernur, bupati, serta wali kota untuk secara aktif menjalin hubungan kemitraan internasional. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Meski demikian, kewenangan tersebut diatur secara ketat agar tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana pemerintah daerah berperan sebagai pelengkap dan pendukung diplomasi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan sebagai pesaing. Hal ini memastikan

sinergi antara pemerintah daerah dan pusat tetap terjaga demi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

2.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri pada Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan KSDPL, yang kemudian diatur dalam pasal 5 ayat (1):

a. mempunyai hubungan diplomatik,
b. merupakan urusan pemerintah daerah,
c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri,
d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintah pusat, dan
e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Kemudian pada ayat (3) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:

a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah,
b. saling melengkapi, dan
c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

BAB 3

INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI YOGYAKARTA-VICTORIA

Menurut konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Alexander S. Kuznetsov dalam buku "*Theory and Practice of Paradiplomacy*", terdapat enam tahapan dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi/negara bagian. Proses tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan antara entitas subnasional. Dalam bab ini, penulis memfokuskan pembahasan pada proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Bagian Victoria. Dalam implementasinya, beberapa tahapan institusionalisasi berhasil dijalankan dengan baik, sementara terdapat satu tahapan mengalami kendala yang menghambat kelancaran proses tersebut. Hambatan dalam proses institusionalisasi kerja sama ini berakar pada batasan regulasi domestik Indonesia, di mana pemerintah daerah merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tunduk pada prinsip kedaulatan tunggal pemerintah pusat.

3.1 Implementasi Tinjauan Institusionalisasi Kerja Sama Paradiplomasi

3.1.1 Departemen Khusus untuk Urusan Kerja Sama Luar Negeri

Pembentukan kementerian atau departemen khusus regional yang bertanggung jawab atas urusan internasional. Departemen khusus ini bertujuan sebagai menjembatani proses kerja sama yang akan dilakukan dari kebijakan apa

yang akan disepakati, program yang direncanakan, dan menjadi aktor penting dalam membangun hubungan diplomasi. Departemen kerja sama luar negeri di dalam struktur pemerintahan daerah memegang peran penting sebagai salah satu aktor utama dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi. Terbentuknya departemen ini memungkinkan pemerintah daerah dapat untuk mengelola dan menginisiasi hubungan internasional secara langsung. Dengan kata lain, pembentukan departemen kerja sama luar negeri yang terpisah antara Kementerian Luar Negeri milik negara dengan departemen kerja sama luar negeri milik subnasional atau pemerintah daerah akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan kerja sama luar negeri (Kuznetsov 2015, 111).

Instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan kerja sama luar negeri di Yogyakarta adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP mendelegasikan tugas ini kepada Bidang Kerja Sama Luar Negeri yang telah diatur atas dasar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66 Tahun 2018, yang mengatur tentang posisi, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, sehingga kegiatan kerja sama luar negeri di Yogyakarta dijalankan melalui kerangka kerja yang telah diatur secara resmi (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda DIY 2018).

Sebagai garda terdepan dalam manajemen urusan luar negeri di Yogyakarta, DPMPTSP memegang tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan kunjungan resmi kenegaraan melalui Bidang Kerja Sama

Luar Negeri. Kapabilitas instansi ini terlihat dari pengelolaan enam hubungan *sister province* yang aktif, meliputi kemitraan dengan Kyoto dan Yamanashi (Jepang), Gyeongsangbuk-do dan Gangwon-do (Korea Selatan), Shanghai (RRT), serta Victoria (Australia).

Selain kerja sama *sister province*, keunggulan DPMPTSP juga terletak pada luasnya portofolio kerja sama teknis. Kemitraan teknis yang masih berjalan mencakup *East Asia Tourism Organization Forum* (1999), *East Asia Local and Regional Congress* (2010), *Australia-Indonesia Center* (2015), *Saemaul Globalization Foundation* (2016), dan *Melbourne Symphony Orchestra* (2017). Sementara itu, sejumlah kerja sama teknis lainnya telah dilaksanakan, di antaranya dengan Karlsruhe University, Medical Peace Foundation, hingga Singapore International Foundation.

Tabel 2. Tabel Klasifikasi Kerja Sama Luar Negeri di Yogyakarta

No	Kategori Kerja Sama	Nama Mitra	Negara	MoU/IA	Status
1	*Sister Province*	Kyoto	Jepang	1985	Aktif
2		Gyongsangbuk-do	Korea Selatan	2005	Aktif
3		Gangwon-do	Korea Selatan	2009	Aktif
4		Shanghai	RRT	2016	Aktif
5		Yamanashi	Jepang	2016	Aktif
6		Victoria	Australia	2017	Aktif
7	Kerja Sama Teknik	East Asia Tourism Organization Forum	-	1999	Aktif

8		East Asia Local and Regional Congress	-	2010	Aktif
9		Australia-Indonesia Center	Australia	2015	Aktif
10		Saemaul Globalization Foundation	Korea Selatan	2016	Aktif
11		Melbourne Symphony Orchestra	Australia	2017	Aktif
12		Karlsruhe University	Jerman	2004	Selesai
13		Suruga Miyagawa Company	Jepang	2004	Selesai
14		Medical Peace Foundation	-	2004	Selesai
15		Juma' Al Majid	UEA	2011	Selesai
16		Orientalisches Universiteit	Jerman	2011	Selesai
17		VHJI	Suriname	2013	Selesai
18		Adelaide Festival Center Trust	Australia	2015	Selesai
19		Wesfalishe Wilhelms-Univ. Munster & Univ. Hospital	Jerman	2015	Selesai
20		Shanghai Theater Academy	RRT	2016	Selesai
21		Indonésienne De Nouvelle	Caledonia	2016	Selesai
22		Singapore International Foundation	Singapura	2017	Selesai

Sumber: Bunga Rampai Kerja Sama Luar Negeri D.I. Yogyakarta

Pengalaman historis panjang Bidang Kerja Sama Luar Negeri dalam mengelola puluhan kerja sama lintas benua menjadi modalitas utama yang memperkuat posisi tawar Yogyakarta. Kekuatan ini tidak hanya bersumber dari kuantitas mitra, melainkan dari kematangan tata kelola paradiplomasi, diversifikasi sektor teknis, serta konsistensi rekam jejak yang membangun kepercayaan di level global.

Bidang Kerja Sama Luar Negeri di DPMPTSP selain membantu Gubernur dalam mengurus bidang perizinan dan penanaman modal, memiliki peran utama sebagai fasilitator dan koordinator untuk kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri. Salah satu tanggung jawab penting bidang ini adalah mengatur serta mendukung jalannya kunjungan dari delegasi luar negeri yang datang ke Yogyakarta. Selain itu, Bidang Kerja Sama Luar Negeri juga bertugas menyelenggarakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program kerja sama luar negeri yang sedang berjalan, semua aktivitas ini dilakukan dengan tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kuznetsov menjelaskan bahwa staf di departemen kerja sama internasional di tingkat daerah perlu memiliki keahlian khusus dalam bidang politik internasional agar dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif (Kuznetsov 2015). Hal ini terlihat jelas dari kebijakan pengangkatan Kepala Dinas DPMPTSP yang secara konsisten dijabat oleh diplomat Indonesia yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Penunjukan diplomat sebagai pimpinan DPMPTSP ini merupakan hasil permintaan khusus dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Fathi Mustaqim. Wawancara Pribadi. 16 Oktober 2025).

Terdapat empat ASN yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Salah satunya memiliki keahlian di bidang politik internasional di hubungan internasional yang menunjang peran strategis dalam pengelolaan kerja sama internasional. Selain itu, terdapat ASN yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi, tetapi telah memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sama luar negeri di Sulawesi Tenggara, menunjukkan adanya kombinasi keahlian akademis dan pengalaman praktis yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas mereka. Sementara itu, dua ASN lain berfungsi sebagai penerjemah fungsional yang mendukung komunikasi dalam kegiatan kerja sama luar negeri, yang juga menunjukkan pentingnya keahlian linguistik dalam pengelolaan pekerjaan internasional di tingkat daerah.

3.1.2 Kunjungan Resmi Pemerintah Daerah ke Mitra

Kunjungan resmi antar pejabat daerah merupakan komponen tak terpisahkan dalam melembagakan praktik kerja sama paradiplomasi. Intensitas atau frekuensi dari kunjungan yang bersifat resiprokal yang di mana kedua belah pihak saling mengunjungi, baik dari Pemda DIY ke Victoria maupun sebaliknya, menandakan indikator kuat yang menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka dalam menjalin hubungan. Kunjungan resmi pemerintah daerah ke wilayah mitra bertujuan untuk meninjau terkait keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya dari mitra dan untuk menggali lebih dalam potensi kerja sama apa yang akan dikembangkan kedepannya (Kuznetsov 2015, 111). Dalam kerangka kerja sama, kunjungan luar negeri bukan hanya sekadar seremoni, melainkan sebuah komponen strategis yang esensial. Tingginya frekuensi kunjungan yang dilaksanakan oleh kedua pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat dan

menandakan bahwa interaksi langsung menjadi pilar utama keberhasilan kerja sama mereka di tingkat internasional.

Gagasan awal kerja sama Pemda DIY dan Victoria, tercetus pada Juni 2013. Hal ini dipicu oleh kunjungan Premier Victoria, Mr. Denis Napthine, bersama 450 delegasi pengusaha UKM membawa misi dagang yang bertujuan mengeksplorasi peluang bisnis di Yogyakarta. Premier Victoria dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur DIY dan dari kunjungan tersebut tercetuslah wacana pembentukan kerja sama persahabatan antara DIY dan Victoria. Wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan usulan resmi melalui KJRI Melbourne dengan nomor surat 1083/PSB/UM/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 (Mustaqim et al. 2022, 22). Atas surat resmi yang diajukan oleh KJRI Melbourne, pada 24-30 Juni 2014 delegasi Pemda DIY melakukan kunjungan ke Victoria, Australia untuk melakukan penjajakan kerja sama, dengan tujuan untuk mengeksplorasi bidang-bidang kerja sama apa saja yang bisa dijalin antara kedua pihak.

Penandatanganan *Letter of Intent (LoI) Friendly Cooperation* dilaksanakan pada 30 September 2015, sebagai puncak dari kunjungan resmi kedua yang dilakukan oleh delegasi Pemda DIY ke Victoria. LoI ini memformalkan kerangka kerja sama yang berfokus pada bidang pendidikan dan seni budaya, serta tidak menutup kemungkinan untuk dapat membuka peluang kolaborasi pada sektor lain di masa mendatang. Selanjutnya, pada 14 November 2015 delegasi Pemerintah Negara Bagian Victoria melakukan kunjungan balasan ke Yogyakarta, dipimpin oleh *Minister for Small Business Innovation and Trade,* Victoria*,* Philip Dalidakis.

Kunjungan Dalidakis ke Yogyakarta bertujuan untuk menindaklanjuti LoI yang telah disetujui untuk menjadi MoU.

Tabel 3. *Timeline* Kunjungan Resmi Pemerintah Daerah Yogyakarta ke Victoria, Melbourne

Agenda	Periode
Delegasi Negara Bagian Victoria berkunjung ke Yogyakarta.	Juni 2013
Delegasi Pemda DIY melakukan kunjungan balasan ke Victoria.	24-30 Juni 2014
Pemda DIY menandatanganan *Letter of Intent* (LoI) *Friendly Cooperation* di Melbourne.	30 September 2015
Delegasi Negara Bagian Victoria melakukan kunjungan balasan ke Yogyakarta	14 November 2015
Delegasi Pemda DIY dalam misi kebudayaan, acara AsiaTOPA di Melbourne.	2017
Kunjungan Pemda DIY ke Wali Kota Melbourne dan Premier Victoria serta Asia Society Australia di Melbourne.	6-7 Oktober 2019

Sumber: Bunga Rampai Kerja Sama Luar Negeri D.I. Yogyakarta

Selain itu, Pemda DIY melaksanakan kunjungan resmi ke Melbourne pada tahun 2017. Kunjungan ini merupakan respons atas undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan *Asia Pacific Triennial of Performing Art* (AsiaTOPA). AsiaTOPA adalah sebuah festival seni kontemporer tiga tahunan di Melbourne, Australia, yang bertujuan untuk merayakan keragaman dan vitalitas kawasan Asia-Pasifik dengan menampilkan karya seniman regional, mulai dari musik, teater, hingga instalasi seni (AsiaTOPA, 2025). Yogyakarta menampilkan teater 'Satan Jawa' karya sutradara Garin Nugroho, sukses menjadi pusat perhatian utama festival

tersebut (Mustaqim et al. 2022, 23). Pertunjukan ini menjadi unik karena menampilkan iringan musik langsung yang mengkolaborasikan antara *Melbourne Symphony Orchestra* dengan musisi gamelan Jawa. Dalam penayangan tunggalnya di Hamer Hall, Melbourne Arts Centre, acara ini berhasil menarik lebih dari 2.000 penonton (Hatley 2017).

Pementasan 'Setan Jawa' di Victoria merupakan manifestasi konkret dari upaya Pemda DIY dalam menjalankan misi kebudayaan. Pertunjukan ini menjadi platform strategis yang berfungsi memperkenalkan adiluhungnya kebudayaan Jawa kepada masyarakat internasional secara luas. Kekuatan utama dari inisiatif ini bertumpu pada kolaborasi artistik yang inovatif, yaitu memadukan alunan gamelan Jawa dengan harmoni orkestra. Sinergi lintas budaya ini tidak hanya membuktikan kemampuan Yogyakarta dalam mengadaptasi warisan budayanya untuk panggung global, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan citra dan reputasi Indonesia maupun Yogyakarta secara signifikan sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan terbuka.

Tidak berhenti pada kegiatan AsiaTOPA 2017, dilanjutkan pada kunjungan Gubernur dan delegasi DIY yang terdiri atas pejabat, staf Pemda DIY, dan perwakilan pelaku industri kreatif ke Melbourne, Victoria, pada 6-7 Oktober 2019. Gubernur DIY mengunjungi pusat-pusat industri kreatif di Victoria, bertemu dengan Wali Kota Melbourne dan Premier Victoria serta bertemu dengan Asia Society Australia. Misi dari Asia Society Australia berupaya memperkaya perspektif Australia tentang Asia, merumuskan kebijakan bagi sektor swasta dan publik, serta menginisiasi terbentuknya koneksi dan jejaring regional yang kontemporer (Asia Society, 2025).

Penjajakan kerja sama di bidang industri kreatif, khususnya pengembangan desain, sejatinya telah direncanakan sejak tahun 2019. Rencana ini dilatarbelakangi oleh reputasi Melbourne sebagai tuan rumah acara bergengsi, seperti Melbourne Fashion Week dan Melbourne Fashion Festival. Akan tetapi, inisiatif tersebut terpaksa terhenti akibat pandemi COVID-19, sehingga realisasinya baru dapat terlaksana lima tahun kemudian. Sebagai puncaknya, pada 11 Agustus 2024, diselenggarakan sebuah *bootcamp* selama dua minggu yang mendatangkan langsung tiga desainer muda dari Victoria. Dalam program tersebut, mereka mempelajari keseluruhan proses pembuatan batik sesuai kreativitas tanpa harus menghilangkan ciri khas Yogyakarta sekaligus berkolaborasi dalam ajang Jogja Fashion Week 2024 (Wicaksono 20219).

Potensi kolaborasi antara Yogyakarta dan Victoria dalam sektor industri kreatif diidentifikasi memiliki landasan yang kuat. Gubernur DIY, dalam sambutan utamanya menegaskan bahwa Yogyakarta mempunyai kapasitas dari segi potensi maupun modal yang cukup untuk bersinergi dengan Victoria. Lebih lanjut, Duta Besar RI untuk Australia, Kristiarto Legowo, dalam pidato pembukanya turut mengafirmasi hal tersebut dengan menyoroti adanya kemiripan antara Yogyakarta dan Victoria dalam pengembangan sektor industri kreatif (Ngagianto 2019).

3.1.3 Partisipasi dalam Berbagai Agenda Internasional

Partisipasi dalam agenda internasional berfungsi sebagai peran strategis bagi pemerintah daerah untuk memamerkan potensi mereka kepada mitra kerja sama di luar negeri. Agenda ini, dapat dilakukan dalam bentuk pameran, forum bisnis, atau misi budaya, merupakan upaya promosi. Tujuannya adalah untuk

menonjolkan keunggulan komparatif dan kekhasan yang dimiliki daerah, partisipasi ini dapat dilakukan seperti pameran atau forum yang diselenggarakan oleh mitra serta dapat mengenalkan adanya kerja sama paradiplomasi kepada masyarakat (Kuznetsov 2015, 112). Pada akhirnya, intensitas keterlibatan kedua belah pihak dalam agenda bersama inilah yang secara bertahap memperkuat hubungan paradiplomasi mereka.

Realisasi komitmen kerja sama kedua mitra juga kuatkan dalam bentuk penyelenggaraan konser kolaborasi dan *Youth Music Camp* tahun 2016-2019. Inisiatif tersebut mengemban misi kebudayaan sebagai sarana untuk memperkokoh relasi dan kapasitas bersama di ranah kesenian serta memperkuat di sektor kebudayaan. Dalam komitmen kerja sama tersebut berkolaborasi dengan *Melbourne Symphony Orchestra* dalam pelatihan musisi muda DIY setingkat SMA dan mahasiswa tingkat awal yang dipandu langsung oleh MSO. Berdasarkan pesan dari Gubernur DIY, kerja sama tidak perlu diberbagai bidang, melainkan menekankan pada pentingnya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun oleh mitra kerja sama. (Fathi Mustaqim. Wawancara Pribadi. 16 Oktober 2025). Fathi Mustaqim, juga menekankan pada pentingnya hubungan *people-to-people* dalam melakukan kerja sama, dengan adanya *Youth Music Camp* ini diharapkan dapat menguatkan hubungan tersebut. Hubungan *people-to-people* didasarkan komunikasi langsung dan membangun jembatan antara individu dan komunitas, diplomasi antar masyarakat dapat membantu meruntuhkan stereotip dan prasangka, mendorong empati dan rasa hormat, serta menciptakan fondasi bagi kerja sama di masa depan (DiploFoundation, 2025).

Tabel 4. *Timeline* Kegiatan *Youth Music Camp*

Agenda	Periode
Youth Music Camp I diakhiri dengan konser kolaborasi di Concert Hall ISI Yogyakarta	2016
Youth Music Camp II diakhiri dengan konser kolaborasi di pelataran Candi Prambanan	2017
Youth Music Camp Internship (bagi dua peserta terbaik *Youth Music Camp* I di markas MSO, Melbourne)	2017
Youth Music Camp III diakhiri dengan konser kolaborasi di Taman Budaya Yogyakarta	2018
Youth Music Camp IV diakhiri dengan konser kolaborasi di Concert Hall Universitas Sanata Dharma	2019
Youth Music Camp Internship (bagi dua peserta terbaik *Youth Music Camp* II dan perwakilan Karaton Ngayogyakarta di markas MSO, Melbourne untuk belajar musik dan manajemen pertunjukan)	2019
Partisipasi Gubernur DIY dalam acara *Creative Economy Forum* (CEF) 2019 di Melbourne	8-9 Oktober 2019
Youth Music Camp diakhiri dengan konser kolaborasi di Laboratorium Seni ISI Yogyakarta	2022
Penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan (*Implementation Agreement*) tentang Fasilitas Prakarsa Budaya dan Sosial untuk periode 2022–2024	22 Oktober 2022
Youth Music Camp diakhiri dengan konser kolaborasi di Auditorium Driyarkara Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	2023
Youth Music Camp diakhiri dengan konser kolaborasi di Lapangan Siwa, Kompleks Candi Prambanan	2024

Sumber: Bunga Rampai Kerja Sama Luar Negeri D.I. Yogyakarta

Walaupun MoU resmi ditandatangani pada 2017, kegiatan kerja sama antar kedua belah pihak sudah dimulai sejak tahun 2016, yang mana difasilitasi oleh Australia-Indonesia Center (AIC) dalam pengeimplemetasian kerja sama DIY dan Victoria (Jannah dan Azmi 2025, 487). AIC merupakan inisiatif bilateral untuk riset kolaboratif yang dirancang oleh kedua pemerintah, beberapa universitas terkemuka dan industri. Misi AIC adalah untuk memajukan keterhubungan *people-to-people* di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan inovasi (the Australia-Indonesia Center, 2025).

Keputusan DIY untuk menjalin kemitraan dengan Victoria didasarkan pada kekuatan strategis yang dimiliki oleh Victoria yaitu keberadaan MSO. Reputasi MSO sebagai institusi musik tertua dan memiliki pengakuan secara global menjadi justifikasi utama, bahwa Victoria merupakan mitra yang ideal untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dalam ekosistem musik maupun manajemen pertunjukan di DIY. Kerja sama ini dirancang sebagai mekanisme untuk terjadinya transfer pengetahuan yang belum dimiliki oleh DIY. Kerja sama ini memfasilitasi pada standar artistis yaitu, peningkatan kualitas dan teknik pertunjukan, tata kelola seni yaitu, modernisasi manajemen pertunjukan dan organisasi seni, dan pengembangan SDM yaitu, akselerasi pengembangan bakat dan profesionalisme musisi lokal melalui *Youth Music Camp* serta magang langsung di markas MSO di Melbourne.

Program magang di markas *Melbourne Symphony Orchestra*, Australia, terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kapasitas peserta. Hal ini dialami oleh Elgar Putrandhra dan Emmanuel Ademerode Alyandu yang berkesempatan belajar langsung dari musisi profesional selama satu bulan. Dalam

laporannya yang berjudul *"*Manajemen dan Program Kerja Melbourne Symphony Orchestra Tahun 2017/2018*"*, Elgar memaparkan bahwa selama magang mereka terlibat dalam 17 konser, yang terdiri dari 11 format orkestra dan 6 format musik kamar. Selain aspek teknis musikal, MSO juga memfasilitasi pertemuan manajemen dan kegiatan rekreasional untuk membangun kedekatan (Putrandhra 2018, 19). Program ini diakui oleh Elgar dan Ode yang telah berhasil memberikan wawasan mendalam mengenai manajemen orkestra profesional sekaligus memperkuat pertukaran budaya antara Yogyakarta dan Melbourne.

Selain berfokus pada seni pertunjukan, upaya pelembagaan kerja sama ini juga diperluas untuk mencakup sektor industri kreatif secara lebih luas. Langkah strategis ini salah satunya diwujudkan melalui kunjungan Gubernur dan delegasi DIY yang terdiri atas pejabat, staf Pemda DIY, dan perwakilan pelaku industri kreatif ke Melbourne, Victoria, pada 8-9 Oktober 2019. Kunjungan ini bertujuan untuk menghadiri *Creative Economy Forum* (CEF) yang diselenggarakan oleh KJRI Melbourne dan berkolaborasi dengan *Indonesia Trade Promotion Centre* (ITPC) di Sydney (Mustaqim et al. 2022, 24). Agenda utama dari forum CEF ini adalah mempertemukan para pebisnis dan pelaku ekonomi kreatif dari Indonesia dan Australia (Sinaga 2019). Konjen RI Melbourne, Spica A. Tutuhatunewa menyampaikan: "CEF 2019 memamerkan produk, antara lain dari DIY Yogyakarta, seperti kerajinan perak, batik, animasi, dan produk digital, Jawa Barat, seperti kriya dari bambu, kayu, dan rotan, serta Navanty Pty Ltd yang membuat produk digital di bawah naungan diaspora Indonesia" (Leba 2019).

Penyelenggaraan CEF mendapatkan dukungan penuh serta dihadiri secara langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu, kegiatan

ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Duta Besar RI untuk Canberra, Kadin DIY, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Global Vic, serta perwakilan dari *Australia Indonesia Business Council* (AIBC) National (asiatoday 2019). Kehadiran Duta Besar dalam konteks ini lebih tepat dianalisis sebagai manifestasi dari pola hubungan "*Parallel-Harmony*" atau "*Cooperative-Coordinated*" (Kuznetsov 2015, 114). Dalam pola ini, aktivitas paradiplomasi daerah berjalan secara mandiri dan paralel dengan diplomasi negara, namun tetap terkoordinasi dan harmonis dengan kebijakan luar negeri nasional.

Kehadiran Pemda DIY dalam forum ini memiliki tujuan strategis, yakni untuk memamerkan berbagai potensi unggulan daerah. Partisipasi dalam jaringan forum internasional menjadi salah satu saluran bagi DIY untuk mempromosikan kepentingannya di luar negeri. Partisipasi ini dapat difokuskan untuk mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif yang menjadi ikon Yogyakarta, seperti kerajinan perak dan batik, kepada audiens yang lebih luas. Penyelenggaraan forum ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memfasilitasi terjalinnya kolaborasi yang lebih erat. Diharapkan forum ini dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan para perajin lokal di DIY dengan komunitas pengusaha di Victoria, yang kemudian dapat membuka peluang investasi baru.

Meskipun Memorandum of Understanding (MoU) telah berakhir pada tahun 2020, komitmen hubungan *sister province* tetap terjalin kuat. Hal ini dibuktikan melalui langkah konkret Dinas Kebudayaan DIY yang melanjutkan kolaborasi konser bersama MSO. Kendati implementasi kerja sama sempat

mengalami jeda pada kurun waktu 2020–2021, hal tersebut didasari oleh kesepakatan bersama untuk memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing. Keseriusan kedua belah pihak dimanifestasikan melalui penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan (*Implementation Agreement*) tentang Fasilitas Prakarsa Budaya dan Sosial untuk periode 2022–2024 pada 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi dan CEO MSO, Sophie Galaise yang disaksikan oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X serta Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Fiona Hoggart.

Manifestasi nyata dari kolaborasi tersebut adalah terbentuknya *Yogyakarta Royal Orchestra* (YRO). Menurut Mei Simanjuntak, Hadiwijoyo, dan Simanjuntak (2024, 118), keberhasilan ini tidak lepas dari peran Direktur Pelaksana MSO, Sophie Galaise, yang mendampingi Pangeran Notonegoro dan tim sepanjang tahun 2020-2021. Atas inisiatif ini, MSO memberikan apresiasi tinggi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Pangeran Notonegoro karena visi inovatif mereka berhasil menghadirkan tradisi musik Yogyakarta dalam nuansa baru. Capaian strategis ini sekaligus menjadi landasan kuat bagi kedua belah pihak untuk segera memperbarui payung hukum kerja sama *sister province* tersebut.

Sebagai manifestasi dari *Implementation Agreement* yang telah disepakati, kegiatan *Youth Music Camp* menjadi agenda tahunan yang dijalankan secara konsisten. Realisasi program ini berlangsung intensif dalam kurun waktu 2022–2024 dengan melibatkan berbagai lokasi strategis di Yogyakarta sebagai tempat perhelatan konser kolaborasi. Dimulai pada tahun 2022 di Laboratorium

Seni ISI Yogyakarta, kegiatan ini berlanjut pada tahun 2023 di Auditorium Driyarkara Universitas Sanata Dharma. Konsistensi kerja sama ini kemudian ditutup dengan perhelatan akbar pada tahun 2024 yang mengambil tempat di situs warisan dunia, Lapangan Siwa, Candi Prambanan, yang sekaligus mempromosikan destinasi budaya Yogyakarta.

Schiavon berpendapat bahwa paradiplomasi berfungsi sebagai alat untuk melakukan promosi (Schiavon 2019, 8). Promosi yang dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti transfer teknologi, pembangunan ekonomi dan pertukaran sosial-budaya. Tujuan dalam promosi pertukaran sosial-budaya untuk menampilkan budaya, nilai, atau bahasa yang berbeda dari unit negara bagian tersebut, serta mendorong kerja sama dan pertukaran di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, atau olahraga.

Dapat disimpulkan bahwa signifikansi utama dari *Youth Music Camp* terletak pada terjadinya proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) secara langsung dari praktisi global ke pelaku lokal. Kehadiran delegasi MSO tidak hanya berfungsi sebagai mitra kolaborasi semata, melainkan sebagai mentor yang memberikan pelatihan teknis terkait manajemen produksi dan strategi pertunjukan. Melalui mekanisme ini, para peserta mendapatkan *privilege* untuk mempelajari praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan orkestra kelas dunia, yang menjadi bekal krusial dalam meningkatkan kualitas industri pertunjukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Ketiadaan Tinjauan Intitusionalisasi Kerja Sama Paradiplomasi

3.2.1 Pembukaan Kantor Subnasional Permanen di Negara Asing

Kantor perwakilan di luar negeri memegang peranan penting dalam kerja sama internasional, khususnya bagi suatu negara. Sama halnya dengan negara yang membuka kantor perwakilan di luar negeri untuk memperkuat kerja sama dan membangun hubungan yang harmonis dengan negara lain, pemerintah daerah juga berinisiatif membangun kantor perwakilan di luar negeri, dengan tujuan yang sama. Pembukaan kantor subnasional ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik serta memberikan dukungan dan konsultasi bagi masyarakat regional di berbagai bidang serta dalam mengembangkan kontak internasional dalam bisnis, budaya, dan bidang lain, dikenal juga sebagai parakonsulat. Melalui kantor perwakilan ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mitra luar negeri, serta mempromosikan potensi daerah dalam bidang ekonomi, budaya, dan lainnya, sehingga kantor perwakilan daerah menjadi sarana strategis untuk mendukung pembangunan daerah dengan memperluas jejaring internasional dan mempererat hubungan bilateral atau multilateral pada tingkat internasional.

Kantor perwakilan digunakan sebagai fasilitas bagi pemerintah daerah untuk mempermudah dan meningkatkan komunikasi dengan mitra subnasional sesuai dengan kepentingan strategis regional (Kuznetsov 2015, 130). Selain itu, keberadaan kantor ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menjalin hubungan bilateral dengan mitra di luar negeri, mempercepat proses koordinasi dalam proyek-proyek kerja sama. Kantor subnasional juga berfungsi sebagai pusat informasi dan promosi yang aktif memperkenalkan

potensi daerah kepada komunitas internasional, sehingga membuka peluang baru dalam bidang investasi, pariwisata, dan pertukaran budaya (Kuznetsov 2015, 133).

Yogyakarta dalam menjalan kerja sama *sister province* dengan Victoria tidak membangun kantor subnasional permanen di Victoria, Australia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia tidak memberikan izin ke pemerintah daerah untuk membangun kantor perwakilan di luar negeri dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi. Syarat dalam memenuhi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dari pemerintah pusat, telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) yaitu, a) mempunyai hubungan diplomatik, b) merupakan urusan pemerintah daerah, c) menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, d) pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri, dan e) sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Kelima syarat pelaksanaan KSDPL tersebut menjadi landasan penting yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan kerja sama dengan mitra luar negeri.

Berdasarkan pada huruf C menekankan bahwa pemerintah daerah dilarang mendirikan kantor perwakilan sendiri karena hubungan luar negeri dilakukan atas nama pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan, bukan atas nama daerah secara individu. Hal ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola urusan politik luar negeri, seperti membuka atau menjalin hubungan diplomatik secara langsung dengan negara lain (Suwartono 2023, 312). Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan

(overlapping) antara pemerintah pusat dan daerah, yang bisa menimbulkan kebingungan maupun konflik dalam pelaksanaan diplomasi (Suwartono 2023, 313).

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan langkah strategis untuk meminimalkan dan menghindari ancaman yang berpotensi muncul di berbagai bidang, mulai dari politik hingga keamanan. Dengan demikian, pembatasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan negara serta memastikan hubungan internasional dijalankan secara terkoordinasi dan konsisten oleh pemerintah pusat. Berbanding terbalik dengan negara federal yang memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun kantor perwakilan di mitra luar negeri.

Pemerintah daerah dilarang membuka kantor perwakilan di luar negeri berakar pada prinsip kedaulatan tunggal Indonesia sebagai negara kesatuan. Bentuk negara ini membawa konsekuensi hukum bahwa hanya negara berdaulat saja yang dapat melakukan hubungan luar negeri, karena daerah tidak dipandang memiliki kedaulatan terpisah. Prinsip ini tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1), yang secara tegas mengklasifikasikan politik luar negeri sebagai urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi wewenang pusat. Tindakan membuka kantor perwakilan permanen dinilai masuk dalam ranah politik luar negeri absolut yang tidak boleh dilakukan pemda. Oleh karena itu, larangan ini mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, sebab kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah bukan lahir dari dalam diri pemda, tetapi karena mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat (Suwartono 2023, 307).

3.2.2 Pembentukan Jaringan Regional Multilateral

Globalisasi tidak hanya memperluas kesempatan bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerja sama paradiplomasi, tetapi juga mendorong mereka untuk dapat lebih proaktif dalam melembagakan hubungan tersebut. Selain kolaborasi antar daerah langsung, kini terbuka peluang untuk membangun aliansi dengan jaringan global multilateral. Dibentuknya jaringan global lintas batas sehingga daerah dapat memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan diplomatik lebih luas, mengeksplorasi bidang serta meraih tujuan secara spesifik (Kuznetsov 2015, 112).

Meskipun forum kerja sama regional yang melibatkan pemerintah daerah merupakan fenomena baru dalam lanskap kerja sama internasional, tren ini mulai menunjukkan perkembangan. Terbukti, sejumlah pemerintah daerah di berbagai negara telah mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi regional atau forum internasional yang berfokus pada sektor-sektor spesifik. Contohnya seperti Provinsi Alberta, Kanada yang menjadi anggota forum Pacific North-West Economic Region (PNWER) yang didirikan tahun 1991. Pertemuan ini mengangkat isu keamanan, perbatasan, ketahanan bencana, energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan, dan pembangunan ekonomi (Kuznetsov 2015, 143).

Secara faktual, baik Pemda DIY maupun Negara Bagian Victoria belum menjalin keterlibatan dalam organisasi atau forum regional multilateral yang sama, yang menegaskan bahwa kerja sama mereka masih bersifat bilateral murni. Dalam wawancara, Fathi Mustaqim menyebutkan bahwa “Jika yang dimaksud

kerja sama multilateral adalah perjanjian atau jaringan yang secara formal melibatkan tiga pihak atau lebih, jawabannya adalah tidak ada."

Ketiadaan platform multilateral ini, meski efektif untuk isu spesifik, menjadi hambatan bagi kedua daerah untuk mengoptimalkan daya tawar kolektif dan melakukan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dari aktor global lainnya (Kuznetsov 2015, 84). Oleh sebab itu, integrasi ke dalam forum multilateral di tingkat Asia Tenggara maupun Asia Pasifik merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mentransformasi hubungan yang eksklusif menjadi lebih inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan efektif bagi kedua wilayah.

Kekuatan sumber daya budaya Yogyakarta, yang telah terlegitimasi melalui berbagai pengakuan UNESCO, tidak berdiri sendiri, melainkan terkonfirmasi melalui rekam jejak historis paradiplomasi daerah. Secara historis, Yogyakarta telah menunjukkan kematangan dalam memanfaatkan aset budaya sebagai *soft power* untuk menarik mitra-mitra strategis global. Hal ini terlihat dari pola kerja sama *sister province* yang terbentuk, seperti Yogyakarta cenderung berjodoh dengan wilayah yang juga menyandang status sebagai pusat peradaban atau kebudayaan di negaranya, seperti Kyoto (Jepang) dan Victoria (Australia).

Keunggulan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY memiliki kapasitas untuk mengelola isu-isu tingkat tinggi. Budaya tidak lagi dipandang sebagai artefak masa lalu, melainkan instrumen modern untuk membuka pintu kerja sama di bidang pendidikan, pelestarian lingkungan, dan ekonomi kreatif. Dengan modalitas ini, Yogyakarta menunjukkan kematangan paradiplomasi yang melampaui daerah lain di Indonesia, menjadikannya simpul utama dalam jaringan

kebudayaan global. Dengan demikian, kekayaan budaya ini membuktikan kesiapan infrastruktur diplomasi Yogyakarta dalam membangun jaringan yang tidak hanya bersifat bilateral (dua arah), tetapi juga multilateral (banyak pihak) berbasis kesamaan nilai warisan budaya.

3.2.3 Bekerja dalam Delegasi Resmi Pemerintah Pusat

Partisipasi pemerintah daerah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh mitra dalam delegasi resmi pemerintah pusat. Mitra akan mengundang pemerintah Indonesia ketika negaranya mengadakan kegiatan terkait pengembangan sektor terkait dalam kerja sama. Dengan keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh mitra, hubungan antara kedua wilayah akan semakin erat dan pelaksanaan program-program yang telah disetujui dapat berjalan dengan lancar (Kuznetsov 2015, 111-113).

Pemerintah pusat tidak mendelegasikan Pemda DIY untuk berpartisipasi dalam agenda internasional. Ketidakterlibatan Pemda DIY ini didasarkan pada fakta bahwa urusan politik luar negeri secara mutlak merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Indonesia. Pemda DIY yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat menimbulkan terfragmentasi, yaitu dalam sebuah delegasi bersama, perwakilan daerah mungkin saja mengalihkan agenda untuk hanya memfokuskan pada kepentingannya sendiri yang terbatas, sehingga mengabaikan isu-isu nasional lebih luas yang sedang diupayakan oleh pemerintah pusat. Melalui otonomi daerah, kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah bukan lahir dari dalam diri Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta, tetapi karena mendapatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat yaitu, Indonesia (Suwartono 2023, 307).

Tujuan utama negara dalam diplomasi adalah untuk menyampaikan satu suara yang resmi di tingkat internasional. Pemerintah pusat mungkin merasa khawatir bahwa partisipasi Pemda DIY dalam kegiatan di Australia dapat menimbulkan kebijakan luar negeri yang tidak terkoordinasi dan membingungkan. Jika agenda di Australia melibatkan hal-hal sensitif, seperti negosiasi perdagangan besar, masalah keamanan, atau kedaulatan, pemerintah pusat akan berupaya keras mencegah Pemda DIY mengirimkan pesan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Kuznetsov juga menyatakan bahwa kegiatan ini termasuk dalam ranah politik tingkat tinggi, sehingga keputusan untuk melibatkan atau tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat (Kuznetsov 2015, 113). Duchacek dalam Kuznetsov (2015, 64) memberikan empat kekhawatiran mengenai kegiatan paradiplomasi:

> [. . .] subnational contacts with foreign centers of political power may become vehicles for various forms of trans- sovereign-meddling. [. . .] Too many subnational initiatives abroad may lead to chaotic fragmentation of foreign policy and cause a nation to speak with stridently conflicting voices on the international scene. [There is] fear of provincial egoism at the expense of the national whole as well as other territorial communities. There is also worry about provincials' lack of training and experience in the harsh world of international relations.

Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah pusat memiliki kekhawatiran apabila pemerintah daerah dilibatkan dalam urusan *high politic*, terutama saat adanya pendelegasian tugas dari pemerintahan pusat. Kekhawatiran ini berkaitan dengan fenomena provincial egoism yang dijelaskan oleh Duchacek, yaitu sikap egoisme daerah yang mengatasnamakan otonomi daerah dan berakibat pada

pembuatan peraturan secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan kebijakan serta aspirasi pemerintah pusat (Bustan 2018). Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa pemerintah daerah bertindak semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, sehingga dapat mengganggu kesatuan dan efektivitas kebijakan pemerintah pusat dalam ranah diplomasi dan urusan *high politic*.

Sebagai contoh, dalam forum ekonomi besar di Australia, pemerintah pusat ingin menekankan masalah ekonomi nasional secara keseluruhan. Namun, mereka khawatir bahwa Pemda DIY akan mengubah arah pembahasan dengan lebih menonjolkan kepentingan daerahnya sendiri, seperti mempromosikan pariwisata Yogyakarta atau budaya lokal. Hal ini dianggap bisa mengganggu tujuan utama delegasi dari pemerintah pusat.

BAB 4

KESIMPULAN

Perkembangan globalisasi telah membuka peluang bagi aktor sub-negara untuk melaksanakan kerja sama internasional. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kerja sama pada masa kini tidak lagi bersifat *state centric*. Melalui mekanisme paradiplomasi, sub-negara dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri dengan tujuan untuk mencapai tujuan domestik masing-masing.

Yogyakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang aktif mengimplementasikan kegiatan internasional, di antaranya melalui pembentukan kerja sama *sister province* dengan Victoria, Australia, yang telah berlangsung sejak penandatanganan MoU pada tanggal 4 Mei 2017. Terdapat enam cara bagaimana kerja sama paradiplomasi diinstitusionalisasikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY melaksanakan tiga dari keenam cara tersebut:

Pertama, terdapat departemen khusus untuk urusan luar negeri, keberhasilan paradiplomasi DIY didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), khususnya Bidang Kerja Sama Luar Negeri. Efektivitas lembaga ini ditunjang oleh strategi penempatan sumber daya manusia yang kompeten, di mana posisi Kepala Dinas secara konsisten dijabat oleh diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri atas permintaan Gubernur. Selain itu, staf pendukung memiliki keahlian spesifik mulai dari politik internasional, ekonomi, hingga kemampuan linguistik, yang memungkinkan pengelolaan kerja sama berjalan secara profesional.

Kedua, kunjungan resmi pemerintah daerah ke wilayah mitra, hubungan kerja sama ini dibangun melalui intensitas kunjungan resmi timbal balik (resiprokal) sejak tahun 2013 yang menunjukkan keseriusan komitmen kedua belah pihak. Proses ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi bertujuan strategis untuk penjajakan potensi yang kemudian diformalkan melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2015 dan MoU pada tahun 2017. Kunjungan ini menjadi fondasi bagi pelembagaan praktik paradiplomasi antara kedua daerah. Kemudian terdapat wacana perluasan di bidang ekonomi kreatif yaitu partisipasi DIY dalam *Creative Economy Forum* 2019 dan kolaborasi desain batik pada tahun 2024 menunjukkan upaya konkret pemerintah daerah dalam mempromosikan produk unggulan lokal (seperti batik dan perak) ke pasar internasional. Sinergi ini didasarkan pada kesamaan karakteristik kedua wilayah sebagai pusat kebudayaan dan kreativitas.

Ketiga, partisipasi dalam acara internasional, Kerja sama ini menitikberatkan pada sektor kebudayaan dan pendidikan sebagai pintu masuk diplomasi (*soft power*). Pementasan 'Setan Jawa' di Victoria merupakan manifestasi konkret dari upaya Pemda DIY dalam menjalankan misi kebudayaan di festival AsiaTOPA 2017 yang mendapatkan apresiasi global. Lebih lanjut, program *Youth Music Camp* (2016-2019) bersama *Melbourne Symphony Orchestra* menjadi mekanisme efektif untuk transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas musisi serta manajemen pertunjukan di Yogyakarta. Program ini difasilitasi oleh mitra strategis seperti *Australia-Indonesia Center* yang memperkuat konektivitas antar-masyarakat (*people-to-people*).

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, Habib. 2021. "Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang." Vol. 3, No. 1, no. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & ilmu Sosial (Publicio) (Januari): 21-22.

Asia Society. 2025. "About Asia Society." Asia Society. https://asiasociety.org/australia/asia-society-australia.

asiatoday. 2019. "Industri Ekonomi Kreatif Indonesia Ditampilkan di Melbourne." asiatoday. https://asiatoday.id/read/industri-ekonomi-kreatif-indonesia-ditampilkan-di-melbourne.

AsiaTOPA. 2025. "Tentang AsiaTOPA." AsiaTOPA. https://www.asiatopa.com.au/about.

the Australia-Indonesia Center. 2025. "Tentang Australia Indonesia Center (AIC)." the Ausyralia-Indonesia Center. https://australiaindonesiacentre.org/tentang/?lang=id.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. "UU No. 24 Tahun 2000." Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44991/uu-no-24-tahun-2000.

Badan Pengkajian MPR RI. 2018. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.

Bustan, Taufan S. 2018. "Egoisme Daerah Picu Federalisme." Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/142275/egoisme-daerah-picu-federalisme#:~:text=SIKAP%20egoisme%20daerah%20atas%20nama%20politik%20otonomi,FISIP%20Universitas%20Malikussaleh%20Lhokseumawe%2C%20Teuku%20Kemal%20Fasya%2C.

Buton, Dewi H., R. Siti M. Narjilan, and Erik. 2019. "Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan." Vol. 1 No. 3 (Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia): 1.

Chandra, Eva Y., and Dyah E. Kurniawati. 2022. "The Practice of Paradiplomacy in Cooperation between the Yogyakarta Special Region Government and the Singapore International Foundation in the Education Sector." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 10 (1) (Februari). 10.31289/jppuma.v10i1.6309.

Dinas Kebudayaan DIY. 2012. "Kesenian di Lingkungan Kraton." Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). https://budaya.jogjaprov.go.id/artikel/detail/127-kesenian-di-lingkungan-kraton#:~:text=Kesenian%20yang%20terkenal%20di%20lingkungan,tari%20Serimpi%20dan%20tari%20Bedoyo.

Dinas Kebudayaan DIY. 2021. "Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Dukung Inovasi Museum." Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY. https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/859-dinas-kebudayaan-kundha-kabudayan-diy-dukung-inovasi-museum.

DiploFoundation. 2025. "People-to-People diplomacy - Diplo." DiploFoundation. https://www.diplomacy.edu/topics/people-to-people-diplomacy/.

Faishal, Mochamad A., and Dina Yulianti. 2024. “Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama Sister Province antara Jawa Barat dan Souss- Massa.” *Jurnal Hubungan Internasional, e-journal.unair.ac.id* Vol.17, No. 1:126.

Fathun, Laode M. n.d. “Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar.” Vol. 1 No. 1:77. Accessed Maret 23, 2025.

Hatley, Barbara. 2017. “Encountering Indonesia at AsiaTOPA 2017 (Part 1).” Inside Indonesia. https://www.insideindonesia.org/archive/articles/encountering-indonesia-at-asiatopa-2017.

Heriyono. 2019. “ORIENTASI POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PANCASILA.” *NURANI* Vol. 19 No. 2 (Desember): 299.

Indriati, Noer. 2010. “PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1:37. 10.20884/1.jdh.2010.10.1.136.

Iqbal, Firdaus M., and Irawati. 2023. “HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PERANGKAT POLITIK : PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASION.” *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.7 No.2 (Desember): 62.

Jannah, Fajar N., and Fuad Azmi. 2025. “Yogyakarta's Parallel Diplomacy Toward Victoria, Australia, in the Preservation and Development of Local Culture Heritage.” *Jpurnal of International Studies* Vol. 2, No. 2 (Mei): 487. 10.24198/intermestic.v9n2.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda DIY. 2009. “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.” JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. https://jdih.jogjaprov.go.id/preview?hash=%252FFmIs4GGCNXMUBjtoZCswTU1YTM1MDhmNjRmZWQ5OTk2NGExZDM2M2QxZWZlZjc0YjJjNTQ5MzI2ZWIwYjYxNzFlYzcwMzAyNDNmNDA1MGS11%252BuhovccZ%252BE9WFJX8Jvz2tlCmacRsJjMdPkjg6iulQ%253D%253D&type=dokumen.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda DIY. 2018. “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal No. 66 Tahun 2018.” Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal No. 66 Tahun 2018. https://jdih.jogjaprov.go.id/hukum/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja-dinas-perizinan-dan-penanaman-modal.

Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. 2019. “Filosofi Istimewa Kota Yogyakarta.” Indonesian National Commission for UNESCO Ministry of Education, Culture, Research and Technology. https://kniu.kemdikbud.go.id/post/baca/filosofi-istimewa-kota-yogyakarta.

Kraton Jogja. 2025. “Cikal Bakal - Yogyakarta.” Kraton Jogja. https://www.kratonjogja.id/cikal-bakal/.

Kuestra, Rodrigo, Cristiano C. Quaresma, and Diego D. Conti. 2025. "Paradiplomacy, Its Actors and Trends: State of the Art and Additional Contributions." *SciELO Brazil* Vol. 47 No. 1 (Januari): 2. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.20254701e20230017.

Kuznetsov, Alexander S. 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. N.p.: Routledge.

Lamont, Christopher K. 2021. *Research Methods in International Relations*. N.p.: SAGE.

Leba, Elsa E. 2019. "Industri Kreatif Indonesia Dipromosikan di Australia." KOMPAS. https://www.kompas.id/artikel/industri-kreatif-indonesia-dipromosikan-di-australia?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/industri-kreatif-indonesia-dipromosikan-di-aust.

Mei Simanjuntak, Stefhani K., Surya S. Hadiwijoyo, and Triesanto R. Simanjuntak. 2024. "Implementasi Kerjasama Sister Province Antar Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Victoria Melalui Melbourne Symphony Orchestra (MSO)." *JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN* Vol. 8 No. 3 (September).

Melbourne Symphony Orchestra. 2025. "About the MSO." Melbourne Symphony Orchestra. https://www.mso.com.au/behind-the-music/about-us.

Miles, Matthew B., and A. M. Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. N.p.: SAGE Publications.

Mukti, Takdir A. 2013. *Paradiplomacy: kerja sama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*. N.p.: The Phinisi-Press.

Mustaqim, Fathi, Roza Y. Sari, Murtianingsih, Novia E. Tama, Ika S. Sulistyaningrum, and Rizki Mahardiani. 2022. *Bunga Rampai Kerja Sama Luar Negeri*. Yogyakarta: Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ngagianto, Jason E. 2019. "Creative Economy Forum Talkshow 2019: Kolaborasi Kreatif Victoria dan Yogyakarta." OZIP (the Leading OZ Indo Post Magazine). https://ozip.com.au/index.php/creative-economy-forum-talkshow-2019-kolaborasi-kreatif-victoria-dan-yogyakarta/.

Paquin, Stéphane. 2020. "École Nationale d'Administration Publique." *Paradiplomacy*, (Januari), 49. 10.1007/978-3-030-28786-3_4.

Peraturan BPK. 2012. "UU No. 13 Tahun 2012." Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064.

Peraturan BPK. 2022. "Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri." Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020.https://peraturan.bpk.go.id/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020.

Putri, Agustina T. 2024. "EVALUASI KERJA SAMA SISTER PROVINCE ANTARA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN NEGARA BAGIAN VICTORIA AUSTRALIA DI BIDANG KEBUDAYAAN." *Universitas Muhammadiyah Malang*, 45.

Renggani, Zh A. 2018. “Kerjasama Sister Province Antara Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dengan Pemerintah Victoria, Australia (2015-2017).” (Mei), 2. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20063.

Riano, Bobby Y. 2022. “Alasan Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Victoria.” *ResearchGate*, (Desember), 5. https://www.researchgate.net/publication/366593990.

Riwayati, Anny, ed. 2024. *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada.

Rizaldi, Muhammad R., Vivit W. Haryati, Caesar A. Wibowo, and Paquita P. Febriandi. 2024. “Analisis Kerja Sama Budaya dalam Program Sister City Yogyakarta-Kyoto Tahun 2016-2021.” *MONDIAL Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 1 No. 2 (September).

Schiavon, Jorge A. 2019. *Comparative Paradiplomacy*. N.p.: Routledge.

Simanjuntak, Stefhani K., Surya S. Hadiwijoyo, and Triesanto R. Simanjuntak. 2017. “Implementasi Kerjasama Sister Province Antar Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Victoria Melalui Melbourne Symphony Orchestra (MSO).” *ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN* Vol. 8 No. 3 (September): 99. http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus.

Sinaga, Yuni A. 2019. “Forum Ekonomi Kreatif Melbourne pertemukan pebisnis RI dan Australia.” ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/1104500/forum-ekonomi-kreatif-melbourne-pertemukan-pebisnis-ri-dan-australia.

Stone, Diane, and Kim Moloney, eds. 2019. *The Oxford Handbook of Global Policy and Transnational Administration*. N.p.: Oxford University Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Susanty, Ade P. 2017. “Kewenangan Daerah dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia.” *JURNAL SELAT* Vol. 5, No 1 (Oktober): 14. http:/ / ojs.u mr a h. a c.i d /in d ex. ph p /s e l a t.

Suwartono, Rahadian D. 2023. “Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30, no. 2 (Mei): 312-313. 10.20885/iustum.vol30.iss2.art4.

Tavares, Rodrigo. 2016. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. N.p.: Oxford University Press.

Thaib, Dahlan. 2005. “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis Dan Yuridis.” *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 30 (September): 238. https://media.neliti.com/media/publications/80756-none-8a5f01a7.pdf.

UNESCO di Indonesia. 2025. “Inskripsi Indonesia di UNESCO – KWRI UNESCO | Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.” KWRI UNESCO. https://kwriu.kemdikbud.go.id/rekam-jejak/umum/inskripsi-indonesia-di-unesco/.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. n.d. “UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” UU No. 23 Tahun 2014. Accessed

October 1, 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014.

Wicaksono, Pribadi. 20219. “Tiga Desainer Australia Mulai Jalani Bootcamp Demi Ciptakan Batik Gaya Baru Jogja Fashion Week 2024.” Tempo.com. https://www.tempo.co/gaya-hidup/tiga-desainer-australia-mulai-jalani-bootcamp-demi-ciptakan-batik-gaya-baru-jogja-fashion-week-2024-26047.

LAMPIRAN

VERBATIM

P = Peneliti, Vikri Aviva Mustaqim

R = Responden, Fathi Mustaqim

Waktu = 16 Oktober 2025

Tempat = Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaku	Percakapan	Keterangan
P	assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh	Opening
R	wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh	
P	Baik, terimakasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Karena saya sudah diberi kesempatan untuk dapat menggali informasi langsung dengan bapak. Perkenalkan saya, Vikri Aviva Mustaqim, program studi hubungan internasional, Universitas Islam Indonesia.	Introducing
	Saat ini saya dengan bapak siapa?	
R	Fathi Mustaqim	
P	Baik pak Fathi, mungkin disini sedikit banyak, bukan agak sih, banyak pertanyaan, ada 19 totalnya. Karena saya menggunakan konsep dari paradiplomasi terutama pada buku yang saya pakai yaitu dari Alexander S. Kuznetsov dengan judul Theory of Practice of Paradiplomacy. Di buku ini menjelaskan bagaimana caranya paradiplomasi itu diinstitusionalkan. Terdapat 6 cara utama dalam menginstitusionalkan paradiplomasi	Structuring & Informing
	Nah, ke-6 caranya yaitu yang pertama ada pembukaan kantor di luar negeri, kemudian yang kedua ada pembukaan kantor subnasional juga di luar negeri, yang ketiga ada kunjungan resmi Pemda, kemudian yang ketiga ada partisipasi dalam acara internasional, dan yang keempat ada pembentukan jaringan global Yang kelima adalah partisipasi dalam delegasi pemerintah pusat	

	Nah, mungkin saya akan bertanya dari yang awal dulu Yaitu tentang, mungkin bisa diceritakan lebih rinci dan konkretnya Bagaimana awal mula kerjasama antara pemerintah daerah Yogyakarta ini dengan Victoria	Open-ended question
R	Jadi sebenarnya, ini *disclaimer* dulu ya, saya bergabung di kerjasama luar negeri Pemda DIY itu baru tahun 2019 Januari. Nah, sementara kalau proses pembentukan kerjasama DIY dengan Victoria itu sudah dimulai sejak 2017, secara resmi 2017 itu MoU nya. tapi untuk proses-proses penjajakan dan lain-lain sepertinya dari 2015-2016 Nanti detailnya saya cek lagi, saya bisa sampaikan di bunga rampe ada.	self-Disclosure
	Jadi, sebenarnya makcomblang yang pertama adalah AIC, Australia Indonesia Center di Monash University di Melbourne, Australia	Giving information
	Awalnya penjajakannya itu sebatas untuk kerjasama di bidang kebudayaan, karena melihat salah satu kekuatan DIY adalah di bidang kebudayaan. Kemudian yang menjadi, ini biasanya kalau dengan negara-negara lain daerah-daerah lain itu kan biasanya MoU dulu baru ada kegiatan kalau ini malah kegiatan dulu baru kemudian di formalisasi dalam sebuah naskah MoU	
	Nah, yang mengawali itu kerja sama antara disbud (dinas budaya) dengan MSO (melbourne symphony orchestra). Untuk pengembangan ekosistem orkestra di DIY. Akhirnya mulai dari 2016 itu diadakan Youth Music Camp. Jadi pelatihan musisi muda DIY setingkat SMA dan mahasiswa tingkat awal gitu dengan pelatih atau instruktur dari Melbourne Symphony Orchestra. Nah kalau untuk fundingnya cost sharing gitu ya. Jadi kalau untuk biaya pelatihan itu ditanggung oleh Victoria, kemudian apa namanya ketika instrukturnya di sini itu di cover oleh Pemda DIY. Setelah itu kemudian ada kunjungan, penjajakan ya baik dari Pemda DIY ke Victoria, maupun dari Victoria ke DIY seperti itu. Hingga kemudian formalisasi kerjasama itu dilakukan tahun 2017 penandatanganan MoU. Nanti detailnya saya kasih ya di file bunga rampenya.	

P	Jadi sebelum terjadinya penjajakan, dishub sudah melakukan kerja sama terlebih duluan dengan MSO ya pak?	Clarification
R	Iya, di fase penjajakan	Confirmation
P	Mungkin, dari aktor utama dalam penjajakan maupun dan penandatangan MoU…	Leading
R	Ohh! Maaf, maaf, ini koreksi ya, jadi memang makcomblangnya AIC itu, kemudian di 2015 itu ada penandatangan sebelum MoU ada LoA, Letter of Intent seperti pernyataan Itu kayak komitmen kita mau bekerja sama. Lalu sebelum lanjut ke MoU di 2000 apa di setelah penandatangan MoU itu ada kegiatan saling kunjung, kemudian 2016 ada youth music camp itu betul, dan 2017 penandatanganan MoU. cuman saya kurang di LoA di 2015 tadi.	Correction
P	Mungkin, kalo dari aktor utama dalam melakukan kerja samanya yang paling sangat lebih dominan dalam melakukan kerja sama itu dari Gubernur nya atau dari pihak DPMPTSP nya ya pak?	Clarification
R	Jadi kalo fungsi dari DPMPTSP itu sebagai fasilitasi sebagai fasilitator untuk pembentukan kerjasama, nanti kalau untuk taraf implementasinya itu kita sesuaikan dengan OPD terkait misalnya kalau di bidang kebudayaan ya kita arahkan leading sectornya atau implementing agency ya ke dinas kebudayaan, seperti itu, jadi kalo kami setelahnya makcomblang, fasilitasi untuk pembentukan kerja sama.	Giving information
P	Jadi lebih ke fasilitator saja ya, jadi ketika ada kerja sama masuk jadi yang pertama kali menangani DPMPTSP nggih?	Restatement
R	Nggih	Confirmation
P	Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ketika Pemda melakukan kunjungan ke Victoria mungkin tujuan utama dari kunjungan tersebut apa ya Pak?	Open-ended question
R	Kalau kunjungan ke Victoria itu kalau di masa-masa awal ya, ya penjajakan ya, pengen lihat langsung, ketemu langsung. Kan beda ya, antara	Giving information

	ketemu daring atau komunikasinya lewat telpon atau video call itu kan beda. Sekalian untuk mengeksplorasi bidang-bidang kerja sama apa saja yang bisa dijalin antara kedua pihak. Mungkin yang dulu penjajakan awal tahunya hanya budaya, tapi ketika ketemu langsung mungkin bisa eksplorasi ke bidang-bidang lain. Kayak sekarang dengan Victoria itu yang cukup aktif tentu yang itu tadi ya bidang budaya dengan MSO. Kemudian dulu pernah ada student exchange, bidang pendidikan berarti ya. Kemudian yang ketiga di bidang perdagangan atau ekonomi kreatif ya, yang ada design, bidang fashion design. Jadi di 2024 itu ada tiga fashion designer muda dari Victoria itu melakukan internship selama kurang lebih satu bulan. Itu berbarengan dengan Jogja Fashion Week lalu di bulan Februari sampai Maret tahun ini itu ada Lia Mustafa, itu satu fashion designer dari Jogja diundang untuk ikut short course tentang fashion design di Victoria.	
P	Baik, jadi ekonomi kreatif maupun pendidikan itu masih terbilang baru-baru ini ya pak di 2024 tadi ya?	Clarification
R	Kalo yang di pendidikan itu di 2019 student exchange. Kalau fashion design, kalau khusus tentang fashion design saya bisa sampaikan di 2019 itu Pak Gubernur berkunjung ke Melbourne, Victoria atas undangan dari KJRI Melbourne nah agenda utamanya adalah menghadiri kreatif ekonomi forum nah beliau juga membawa delegasi beberapa pelaku usaha ekonomi kreatif salah satunya rektornya dari Amikom Pak Prof Yanto. Nah, sepulang dari kunjungan dari Melbourne, kemudian Pak Gub itu mengundang beberapa pelaku desain, pelaku industri desain untuk semacam follow up dari kunjungan ke Melbourne. Jadi, beliau minta dibentuk semacam tim kecil pengembangan fashion di DIY dengan menggandeng mitra Victoria. Karena Victoria ini, khususnya Melbourne itu kan punya event fashion yang cukup besar ya, Melbourne Fashion Week dan Melbourne Fashion Festival. nah harapannya nanti beberapa pelaku industri fashion itu bisa bekerja sama dengan mereka entah dalam bentuk pameran bersama, internship, atau yang lain-lain. nah itu kemudian akhirnya terealisasi baru di tahun 2024	Correction

	karena setelah 2019 kan ada covid ya, duaribu, covid tu duaribu maret ya, 2020 maret ya. Di 2020-2023 itu nyaris tidak ada kegiatan ya dibidang fashion, baru di 2024. Tapi kalo youth music camp itu jalan terus, hanya bener bener off pas puncak puncaknya covid di 2020-2021. Itu masuk ada konser bersama secara daring, tidak ada camp tapi ada kolaborasi, konser kolaborasi.	
P	Baik, jadi ketika dalam ekonomi kreatif itu dimulai penjajakannya tu di 2019 tapi riil nya pengimplementasian di 2024	Summarization
R	Iya	Confirmation
P	MoU ini berlaku selama 3 tahun ya dan terhenti di 2020, kemudian 2021 sempat terhenti karena ada covid, apa betul ya?	Probing for conformation
R	Iya, jadi gini, memang MoU itu berlaku 3 tahun, harusnya di tahun 2020 itu kita perpanjangan. Nah di tahun 2019 pertengahan 2019 itu kami sudah intens berkomunikasi dengan pihak Victoria terutama DPC department of premier and cabinet, jadi kaya kantor kemensetneg nya victoria. Nah itu Kita sudah saling tukar draft MoU bahkan sudah dilampiri dengan plan of action selama 3 tahun kedepan 2020 sampai 2022 kita mau ngapain. Kita sudah beberapa kali video conference sama mereka pakai Webex. Udah hampir final kita tinggal minta acc ke kemendagri, kemenlu mereka juga perlu apa namanya tanggapan internal mereka terutama di legal division mereka. Nah udah mau tandatangan, rencananya di bulan Mei atau April. Di awal 2020 ada covid akhirnya tertunda. Karena alasan utama yaitu masing masing daerah concern menangani covid. Kemudian setelah covid mereda ya mulai mereda di tahun 2022 kita coba komunikasi lagi dengan Victoria. Ternyata mereka lagi sibuk ngurusin struktur kabinet mereka Jadi ada Ada perubahan Struktur pemerintahan Di Victoria Sehingga kita lebih baik menunggu hasil pemerintahan baru seperti apa. lalu di 2023 kita mulai lagi komunikasi dengan pemerintahan yang baru ini sekarang 2025 ya, 2024 kita mulai drafting naskah MoU yang baru. Lalu di, itu proses nya panjang ya karena di Indonesia sendiri, kami tidak bisa kemudian langsung memberi persetujuan itu	Confirmation

	ya. Oke ini draftnya, karena perlu rapat interkementerian. Jadi kami itu induk, pemerintah daerah itu kan induknya, bapaknya itu kemendagri, kementerian khususnya di pusat fasilitasi kerjasama di Setjen kemendagri. Nah nanti kemendagri akan mengundang mitra strategis mereka, terutama dari kemenlu itu di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, yang bidang sosial budaya. Nah nanti melihat tuh di MoU-nya bidangnya apa saja, itu nanti diundang juga kementerian yang terkait. Kalau ini bidang budaya, berarti kementerian budaya. Pendidikan, berarti kementerian Pendidikan. Tergantung sektor nya. setelah dapat approval dari internal kami baru kami bisa mengirimkan draft itu ke pihak Victoria untuk mereka bahas lagi di internal mereka, mereka setelah itu ngirim counter draft tinggal setelah itu diskusi penyusuan-penyusuan hingga draftnya sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Secara praktis 2020 sampai 2022 tidak ada kegiatan. Tapi yang perlu dicatat walaupun secara normatif legal formalnya itu MoU-nya sudah expired sudah kedaluwarsa itu kegiatan khususnya yang youth camp ya itu masih tetap berjalan	
P	Mungkin karena tadi sudah dilakukan penjajakan dan kunjungan resmi pemerintah daerah ke Victoria, mungkin pasti ada tantangan maupun hambatan yang dialami dari pemerintah DIY dalam melakukan kunjungan tersebut. Tantangan ataupun hambatan yang dialami itu apa saja ya pak?	Probing / open-ended question
R	Kendala biaya, itu imbasnya ke jumlah delegasi sehingga tidak maksimal jumlah terbatas. Kalau secara support sih dari kemendagri, kemlu, dan KJRI dan kantor perwakilan cukup suportif	Giving information
P	Jadi hanya di kendala biaya saja ya?	Clarification
R	Sebenernya hanya di biaya saja, kalo terkait koordinasi dan komunikasi enggak ada masalah. Visa dan sebagainya tidak ada masalah. Karena ada keterbatasan biaya sehingga hanya saja semua sektor tidak bisa ikut untuk mewakili sektor lainnya	Confirmation
P	Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu karena sudah banyak sekali sister province yang telah dilakukan oleh DIY dan rata rata di kebudayaan.	Probing for rationale / open-ended question

	Mungkin apa alasan utama kenapa memilih Victoria sebagai mitra strategis terutama di kebudayaan, di musik ya. Apabila kita bandingan dengan Kyoto juga di bidang kebudayaan?	
R	Kalau boleh dibilang, sebenarnya kita tidak memilih mitra ya. Mitra yang memilih kita. Jadi bukan jemput bola kita kalau di DY itu seringnya menerima bola. Karena banyak banget yang pengen di comblangin sama DIY, gaya banget ya. Tapi memang seperti itu Bahkan kita sampai Dalam tanda kutip ya Nolak-nolak Karena melihat satu kekuatan potensi kedua daerah Terus dua kekuatan personel yang menangani Kerja sama luar negeri Sekarang hanya empat orang Sama-sama Mbak Eta, plus Pak Kepala dinas yang kebetulan lagi kosong sekarang. Jadi kalau pesannya harus ada dong Pak Gubernur, itu terkait KSLN bekerja sama luar negeri itu paling tidak ada 3. Yang satu, mitra gak usah banyak-banyak. Yang penting kegiatannya jalan aktif Terus bidang yang dikerjasamakan juga gak usah banyak-banyak Yang penting ada manfaat yang diterima oleh kedua pihak. Terus yang ketiga ada periode waktu kerjasama untuk kemudian bisa dievaluasi apa yang perlu diperhatikan Atau apa yang perlu ditambah bidang kerja sama seperti itu. menambahkan juga terkait kenapa kok kebudayaan. Memang pilar terkuat di DIY itu ada tiga, kebudayaan, pariwisata dan pendidikan. Jadi memang tiga sektor ini yang paling menarik ya, dan paling simple atau mudah untuk dikerja samakan karena dari kedua belah pihak ada pertukaran budaya, dari kedua belah pihak juga akan pertukaran pelajar pendidikan ataupun guru ya, lalu dari kedua belah pihak juga akan pertukaran pariwisata. Jadi memang pilar DIY ini tiga pilar yang terkuatnya memang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sektor-sektor lain. Contohnya kalau di Korea Selatan itu DIY dengan Gyeongsangbuk-do itu ada pemberdayaan masyarakat, ada pertanian, ada banyak hal. Jadi memang tidak menutup sektor lain, tetapi memang yang paling kuat di DIY itu adalah memang kebudayaan pendidikan dan pariwisata	Reframing / giving information
P	Jadi tidak ada alasan khusus kenapa memilih Victoria ya?	Clarification

R	Kalau sebelum LoI dan MoU kan ada proses menjajakan Nah di proses menjajakan itu kan sambil melihat lihat kekuatannya masing masing itu apa. Terus waktu itu yang mencoba mencomblangi lagi kan AIC ya, Australia Indonesia Center Melihat, oh ini ada kekuatan di bidang budaya, khususnya di orkestra. Di Victoria, Victoria punya MSO, yang merupakan orkestra tertua. Kalau kita lihat, ini impact kerjasamanya ya, kalau kita lihat. Di tahun 2016, itu orkestra kan belum terlalu dikenal ya di kalangan di apalagi anak muda Dulu kan orkestra itu yang nonton kan kasepuhan dan Masyarakat Atas, kalau dilihat berapa tahun itu berarti hampir 10 tahun kemudian belum ada 10 tahun. Kalau lihat konser orkestra yang diselenggarakan di Disbud atau YRO, sampai banyak banget yang nonton. Dan kebanyakan malah anak muda. Nah itu kan artinya benefit, ada lah *ono sek mentes* dari kerjasama itu, pembentukan ekosistem orkestra dan perlu dicatat juga lahirnya YRO itu salah satunya juga didukung oleh MSO yang notabennya merupakan mitra kerja sama DIY. Kalo nggak salah malah diskusinya ketika covid jadi pas covid itu keraton bentuk YRO dengan diskusi-diskusi lewat Zoom seperti itu. Tapi betul tidak melulu kebudayaan ya. Seperti tadi dengan Gyeongsangbuk-do kan kita malah lebih kental di pemberdayaan masyarakat, SDM, tentang saemaul undong. Dengan Jepang, Gangwon kita juga ada pertukaran atlet. Kalo Kyoto ke lukisan.	Giving information
R	Kalau yang tadi tentang teori praktik paradiplomasi yang nomor satu tadi tentang kantor perwakilan. Kalau kebijakan pemerintah Indonesia tidak membolehkan pemerintah daerah membuka kantor di luar negeri. Beda dengan Victoria, kalau Victoria dia punya kantor perwakilan di Jakarta, VGTI Victoria Government Trade and Investment Office. Nah, biasanya kita juga lewat VGTI nih kadang kadang untuk menjebatkan komunikasi karena mereka punya local staff ya orang Indonesia ya jadi lebih mudah kan buat kita komunikasi mereka yang channeling ke Victoria.	
P	Jadi yang menjembatani ketika ada komunikasi melalui VGTI ya?	Clarification

R	Tidak selelau, tapi sering	Correction
P	Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai partisipasi dalam acara internasional. Nah mungkin bisa diceritakan bagaimana pemerintah daerah itu dalam mengikuti acara-acara internasional, terutama yang diselenggarakan oleh Victoria maupun Australia?	Transition / open-ended question
R	Jadi kalau kunjungan luar negeri saat ini semakin ketat, dari dulu juga memang ketat harus mendapatkan persetujuan izin yang berjenjang. Mulai izin dari kemendagri, kemudian di ases sekneg, dinilai urgensinya apa, kalau sudah oke, nanti ke kemlu untuk mengeluarkan exit permit itu kaya izin prinsip untuk bisa melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, karena pemda bagian dari ASN harus mengikuti mekanisme perizinan seperti itu dan utamanya dapat surat undangan ya dari mitra, tidak kemudian kita inisiatif, aku mau kesana dong (tertawa) pernah di tahun 2016 atau 2017 ya? Oh di 2017, kita mengirim misi kebudayaan ke Melbourne di ASIA TOPA (Asia-Pacific Triennial of Performing Arts) itu kita membawa menampilkan panggilan Setan Jawa karya Garin Nugroho, kayak drama musikal. ASIA TOPA itu cukup besar juga sih, karena 3 tahunan dan pesertanya tidak hanya dari Australia, ada juga dari Eropa.	Giving information
P	Jadi untuk partisipasinya ketika awal penjajakan itu yang dilakukan berpartisipasi dalam pagelaran misi kebudayaan tadi ya dari yang dilakukan oleh pemerintah daerah?	Clarification
R	Iya, tapi itu 2017 ya, 2017 sudah MoU sih, kalo pas penjajakan belum. 2016 baru youth music camp, LoI 2015, youth music camp 2016, MoU 2017 plus ada pagelaran itu	Correction
P	Jadi untuk selama rentan waktu setelah MoU 2017 sampai 2020 partisipasi yang ada hanya ini atau yang lain?	Probing / closed question
R	Kalau yang besar hanya ini, ASIA TOPA, terus kita ada konser besar di 2017 di rangkaian youth music camp itu ada pagelaran kolaborasi antara musisi yang profesional ya kalo yang tadi kan siswa ya,	Giving information

	musisi profesional DIY kolaborasi sama musisi melbourne symphony orchestra itu bikin konser orkestra di pelataran Candi Prambanan	
P	Sudah dilakukan partisipasi acara internasional diselenggarakan oleh Victoria kemudian juga setelah penandatanganan MoU selama satu periode yang sudah dilakukan 2017 sampai 2020. Mungkin sudah ada apa ya, eee kegiatan seperti apa yang sangat memperkuat keduanya hubungan budaya antara Yogyakarta dan Victoria	Probing for impact / open-ended question
R	ya yang jelas itu tadi Music Camp yang dilakukan setiap tahun. Nah yang menarik dari Youth Music Camp itu setelah 2018 kalau nggak salah ya, itu peserta terbaik dari Youth Music Camp itu mendapat kesempatan internship satu bulan magang di markasnya MSO. Itu kan semakin menguatkan people to people relation ya. Terus di 2019 itu ada program namanya VYL Victorian Young Leaders to Indonesia itu yang student exchange itu tadi Ada 30-an siswa setingkat kelas 2, 2 SMA berarti itu kelas *piro yo*? berarti kelas 10 ya itu mereka stay di Jogja. Jadi selama kurang lebih 3 minggu, seminggu itu di kelas mereka. Kemudian selama 2 minggu itu mereka tinggal dengan host family dan belajar di host school. Disebar ke beberapa sekolah, terus tinggal bersama beberapa keluarga. Juga semakin menguatkan people to people nah pas di sela-sela program VYL itu salah satu wakil gubernurnya, wakil premier atau wakil gubernurnya ya? oh debuti premier namanya Mr. James Merlino itu juga meninjau langsung kegiatan dan bertemu dengan Bapak Gubernur juga mengapresiasi program penerimaan VYL di Jogja	Giving information
P	Jadi kegiatan partisipasi yang paling unggul itu selain dari kebudayaan ataupun musik juga ada di pendidikan, terutama di exchange	Summarization
R	Selama periode itu ya, 2015 2020. 2019 pas kunjungan apa namanya pak gubernur ke Victoria itu kan membawa beberapa pelaku usaha itu tadi, mereka juga menjajaki ke beberapa perusahaan beberapa pelaku industri kreatif disana yang kemudian bisa di tindak lanjuti di 2024	Giving information

P	Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pembentukan jaringan global. Tadi sudah disebutkan ya pak yang pertama kali mencomblangi itu ada Australia Indonesia Center. Nah peran AIC sendiri ini apa yang sangat mempengaruhi kok bisa ada AIC kemudian kok bisa membangun kerja sama antara Yogyakarta dengan Victoria	Probing for rationale / open-ended question
R	Jadi kalau AIC itu kan kalau saya lihat visinya kan adalah membangun kedekatan antara kedua negara, khususnya di Indonesia dan Australia. Government to government relation itu penting, tetapi yang jauh lebih terasa impactnya itu kan people to people. Memang kita butuh payung, apa kerjasama formalnya tapi kemudian yang melaksanakan penerimaan perhatian itu kan pasti masyarakat, nah AIC itu bergerak di dua hal itu jadi mereka melihat ya secara riset dulu mereka kira-kira kekuatan yang bisa dicomblangin antara Australia sama Indonesia daerah mana nih? Akhirnya mereka ngelihat, oh kayaknya Victoria nih. Victoria dengan Jogja. Karena dua-duanya itu punya karakter yang mirip. Melbourne ibu kotanya itu kan juga dikenal sebagai kota pendidikan, sama kayak Jogja. Kemudian industri kreatifnya juga cukup maju. Lalu di sisi kebudayaan mereka juga kuat gitu akhirnya coba dengan kesamaan-kesamaan ini dicoba dijajaki, AIC juga tidak langsung ke Pemda tapi juga mencoba komunikasi dengan kantor perwakilan di sana KJRI dan KBRI ini disambut dengan baik akhirnya kemudian disampaikan ke Pemda DIY. Pemda DIY oke, ya sudah, kemudian saling menjajaki, saling melakukan penjajakan, baik secara langsung maupun melalui virtual. Hingga kemudian di 2015, kedua daerah oke, menyatakan kehendak mereka untuk bekerja sama dengan menandatangai MoU itu.	Giving information
P	Jadi bisa di bilang yang pertama kali nge-reach out terlebih dahulu itu dari pihak Victoria nya tadi ya?	Clarification
R	Iya itu tadi, kita lebih banyak menunggu bola. Ini kaya gandis cantik gitu ya (tertawa) nunggu dilamar. *Ora* menang milih, tapi menang nolak (tertawa) mau nolak atau menerima	Conformation

P	Apakah ada organisasi lain selain AIC, yang turut ikut serta dalam membantu membangun kerja sama ini?	Probing / closing question
R	Yaa KJRI, KBRI Australia juga, VGTI juga	Giving information
P	Jadi sebelum kerja sama ini sudah ada. VGTI sudah ada ya duluan ada di Jakarta?	Clarification
R	VGTI ituu, iya, kayanya sudah ada duluan. Cuman kalo peran VGTI lebih banyak ketika sudah signing, sudah terjadi kerja sama	Giving information
P	Setelah ada Letter of Intent baru ikut turut serta andil ya?	Clarification
R	Iya	Confirmation
P	Baik, selanjutnya yaitu mengenai partisipasi dalam delegasi pemerintah pusat mungkin pemerintah pusat pernahkah atau mengutus ataupun juga memberi mandat ataupun suruh mewakili pemerintah daerah terutama Yogyakarta untuk hadir ke Victoria maupun ke Australia setelah keseluruhan untuk menghadiri acara, kegiatan, partisipasi atau seperti apa Pak?	Transition / open-ended question
R	Perlu di cek ya datanya, kalau untuk Australia atau Victoria kayaknya belum. Cuman dulu Pak Agus pernah diundang sama BKBN ya untuk menjadi bagian delegasi RI ke Shanghai. Terus, kalao Victoria atau Australia kayanya belum. Cuma dari Kadin DIY (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) pernah diajak terlibat di perundingan IA-CEPA. Cuman kalo Pemda enggak, dari Kadin DIY aja, Pak George	Giving information (negative answer)
P	Jadi untuk yang mewakili dalam perundingan IA-CEPA dari pemerintah daerah yaitu Kadin ya?	Clarification
R	Iya, Kadin, namanya kalo gak salah George Marantika. Itu kan juga ketua IABC Indonesia Australia Business Council. Cuma keterlibatan sejauh apa, kita nggak tau, hanya tau belia pernah terlibat dalam delegasi. Kalau di pemda enggak. Kita lebih ke paradiplomasi. Ini kan lebih ke high diplomacy. Kalo kita kan ya low aja lah, kebudayaan, pendidikan	Confirmation

P	Jadi belum ada mandat langsung dari pusat ya untuk datang mengikuti acara?	Clarification
R	Kalau untuk mandat ya itu, mandat izin aja (sambil tertawa) oh ya itu di 2019 kita ke Melbourne atas undangan KJRI ya, nah itu bisa dibilang mandat atau bukan atau sebatas undangan. Kalau masuk ke delegasi resmi Pemerintah RI ke Australia kita belum. Kan beberapa kali Pak Jokowi ya, pernah kunjungan ke Australia. Cuma sebelum kunjungan presiden ke luar negeri, itu ada rapat intercamp, kemudian pemda pemda yang punya mitra mitra di Australia di kumpulin untuk menjaring masukan atau update atau rencana. Termasuk DIY dimintai informasi juga, kita punya apa kerja sama dengan Australia, kita sampaikan kegiatan dengan Victoria. Itu jadi deliverable, deliverable itu bahan yang jadi kayak bahan masukan untuk presiden nanti ketika ketemu dengan pejabat tinggi di sana itu bisa jadi bahan obrolan bahan-bahan pembicaraan	Correction
P	Jadi untuk kegiatan delegasi mungkin kalau dari pemerintah daerahnya lebih ke ketika ada intern dari MSO nya tadi ya pak? Maksudnya yang sangat terlihat partisipasi masyarakat yang dikirim ke Victoria untuk intern selama satu bulan.	Clarification
R	Iya, betul	Confirmation
P	Baik, selanjutnya, dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan kerja sama tadi hanya diwakilkan oleh kemendagri saja ya?	Clarification
R	Karna yang in charge ya, untuk menangani kerja sama sister kerja sama teknik di kemendagri di pusat fasilitasi kerja sama di sekretariat jenderal dan setiap tahun biasanya kita diminta untuk menyampaikan laporan ke kemendagri, kerja sama yang sedang dilakukan apa saja, kendalanya apa saja, manfaatnya apa. Minimal setahun sekali	Confirmation
P	Bisa dijelaskan, tadi ada larangan dari pemerintah pusat tidak boleh membangun kementerian atau kantor subnasional ada di luar negeri. Adanya larangan tersebut apakah menjadi kendala pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama	Probing / open-ended question

	ataupun komunikasi dengan mitra?	
R	Selama ini sih kita hubungan dengan kantor perwakilan cukup baik ya, apalagi sejak tahun 2005 dinas yang menangani kerja sama luar negeri selalu dipimpin oleh diplomat. Jadi kepala dinas DPMPTSP ini sesuai request dari pak Gub selalu diisi diplomat dari kemenlu. Itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan mitra. Dan sudah ada KBRI dan KJRI, jadi tidak perlu membuka kantor perwakilan di luar negeri karna sudah ada KBRI KJRI dan khususnya Jogja ini Daerah Istimewa Yogyakarta ini spesialnya adalah kepala dinasnya dari kementerian luar negeri memang benar. Menjadi salah satu penyambung lidah untuk kita yang mau disampaikan. Adanya pejabat kemlu yang ada di Jogja kita punya beberapa mitra sister yang cukup aktif juga, karena kunjungan pejabat luar negeri ke DIY itu cukup sering, cukup intens biasanya setiap bulan ada kunjungan. Selain dubes asing, dan juga pejabat asing dan negara sahabat yang pas ke Indonesia juga sekalian ke Jogja. Kaya dulu apa, presiden Jerman pas covid itu ke Indonesia tujuan hanya dua, ketemu presiden dan kedua ketemu pak sultan, dan sama seperti kaisar Jepang.	Giving information (negative barrier & rationale)
P	Pertanyaan terakhir, selama periode penjajakan tahun 2015 hingga akhir masa expirednya MoU 2020, pencapaian terbesar selama periode ini dan tantangan utama proses kerja sama terutama di bidang kebudayaan Yogyakarta dengan Victoria apa ya pak?	Closing question
R	Pencapaian terbesarnya, ya sustainability kerjasamanya, tadi disampaikan MoU itu berlangsung atau efektif hanya 3 tahun, 2017 sampai 2020, harusnya kan setelah itu langsung diperbarui, tapi karena ada beberapa kendala tapi yang unik adalah karena melihat pentingnya kerjasama antara people to people kedua daerah ini walaupun MoU sudah dalam tanda kutip expired, kerjasama masih tetap berlangsung contohnya Youth Music Camp. Youth Music Camp itu paling awalnya, payung terbesarnya itu memang MoU di Irvington ya. Tapi yang melakukan mengelomentasinya adalah MSO dan disbud. Ketika MoU-nya sudah berakhir, karena	Giving information

	melihat apa namanya, antusiasme masyarakat cukup besar di bidang musik, itu kembang musik orkestranya itu setelah 2020 masih tetap jalan sampai sekarang setiap tahun tetap melakukan youth music camp itu mungkin kalau bisa dibilang pencapaian. Karena menurut saya itu, sustainability, karena ada kerja sama itu ketika sudah MoU, sudah selesai, jadi kaya MoU souvenir gitu ya. Karena ada pejabat ke Indonesia, dateng eh ini apa namanya, ada bos saya yang mau dateng nih, kita bikin kerja sama ya, besok siang buat MoU, tolong segera dibuatkan naskahnya. oke setelah itu diproses-proses-proses kemudian pejabatnya kesini dateng ditemukan dengan pejabat kita tanda tangan setelah selesai MoU udah gak ada kegiatan implementasi kegiatannya gak ada tapi yang menarik malah ini kalau dibilang capaian terbesar ya menurut saya ini sustainability nya ini malah kebalik ya walaupun MoU barunya itu belum ada gitu udah deh kita tetap jalan aja kegiatannya dan bahkan beberapa instruktur MSO itu menganggap ketika sampai di Jogja itu ini kan pas lagi mereka ada disini di Jogja itu kayak rumah kedua mereka. Kemudian salah satu peran pembentukan Yogyakarta Royal Orchestra berkat kerja sama dengan MSO.	
P	Ini merupakan follow up question ya pak, eee untuk jabatan struktural organisasi di Bidang Kerja Sama Luar Negeri. Apakah terdapat staff yang memiliki latar belakang pendidikan di politik internasional?	Closing question
R	Kalo yang khusus HI tu cuma mbak Eta (sambil tertawa) secara pendidikan ya, terus juga kepala dinas juga dari kemlu, otomatis ada pendidikan diplomat berjenjang. Kalo saya (Fathi) dan mas Fuad ini sebenernya penerjemah fungsional kemudian dapet tambahan tugas untuk menangani kerja sama luar negeri. Kalo mas Surya lulusan ekonomi, tetapi dulu waktu, waktu pindahan dari Sulawesi Tenggara, yang ngurusi kerja sama luar negerinya Sulawesi Tenggara. Saat di pindah ke sini, dimasukkan ke kerja sama luar negeri.	Giving Information
P	Apakah terdapat jaringan multilateral atau kerja sama multilateral yang di bentuk antara Yogyakarta dan Victoria atau Yogyakarta dan Victoria	Probing / open-ended question

	tergabung dalam satu jaringan kerja sama multilateral?	
R	Jika yang dimaksud kerja sama multilateral adalah perjanjian atau jaringan yang secara formal melibatkan tiga pihak atau lebih, jawabannya adalah tidak ada. Jika yang dimaksud adalah “multilateral" adalah melibatkan lebih dari dua pihak dalam suatu program, jawabannya adalah iya. contoh: Youth Camp melibatkan Melbourne Symphony Orchestra dan Australia-Indonesia Centre dan Pemda DIY, dalam hal ini Disbud DIY.	Giving Information
P	Terakhir, apakah benar dalam merumuskan MoU, Victoria melakukan pembatasan bidang kerja sama di bidang ekonomi? Apabila benar, apa alasan atas pembatasan bidang tersebut?	Probing / open-ended question
R	Kerja sama DIY-Victoria ada tiga bidang, yaitu satu, Industri kreatif & kebudayaan, dua, Inovasi Terus yang terakhir ada di bidang Pendidikan. Jadi, tidak tepat jika dikatakan area kerja samanya hanya dibatasi pada bidang ekonomi saja.	Giving Information

VERBATIM

P = Peneliti, Vikri Aviva Mustaqim

R = Responden, Yohanes Alfonsus Liquori Vishnu Satyagraha

Waktu = 16 Desember 2025

Tempat = Daring melalui percakapan WhatsApp

Pelaku	Percakapan	Keterangan
P	Mengenai timeline kegiatan magang Youth Music Camp di markas MSO pada tahun 2017, 2018 dan 2019 apakah tidak berjalan? Hanya berjalan di tahun 2017 (untuk Youth Music Camp 1 2016) dan 2019 (untuk Youth Music Camp 2 2017). Bagaimana program magang Youth Music Camp ke-3 (2018) dan ke-4 (2019)?	Probing / open-ended question

R	Mas, hasil Youth Music Camp 2016 berangkat magang 28 Oktober sampai tanggal 24 November 2017 atas nama Elgar dan Ode. Tahun 2017 tidak ada Youth Camp tapi konser kolaborasi. Youth Music Camp 2018 berangkat magang Nov 2019 atas nama Iqbal, terus ada Ikhsan dan Jalu	Giving Information
P	Selain konser kolaborasi, terdapat bentuk kerja sama lain dengan MSO yaitu, manajemen pertunjukan. Melalui manajemen pertunjukan mohon jelaskan keberhasilan MSO dalam memberikan workshop tersebut. Apa bentuk keberhasilan workshop dalam periode 2016-2024?	Probing / open-ended question
R	Program art manajemen workshop itu dinilai cukup berhasil karena melihat dampak dampak baiknya. Dampak baiknya apa saja yang pertama bagi ekosistem orkestra khususnya. Personil personil yang dulunya menjadi peserta sekarang menempati posisi-posisi strategis yang menggerakkan ekosistem orkestra di Yogyakarta. Salah satunya yang dapat kita sebutkan yaitu di Yogyakarta Royal Orchestra. Nomor kedua selain ekosistem orkestra sendiri karena peserta art manajemen workshop juga meliputi orang-orang yang bergelut atau mempunyai concern pada seni pertunjukkan seperti wayang, seperti gamelan, dongen dan sebagainya sehingga meningkatkan kemampuan tata kelola manajemen talenta di Yogyakarta begitu.	Giving Information



Foto bersama sebagai penutup rangkaian agenda wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu D.I. Yogyakarta pada 16 Oktober 2025